



Munich Personal RePEc Archive

Some Perspectives on Inclusive Economic Development in The New Normal Era

Juhro, Solikin M. and Ridwan, Masagus H.

Bank Indonesia Institute, Bank Indonesia Institute

December 2021

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/115855/>
MPRA Paper No. 115855, posted 04 Jan 2023 17:51 UTC

Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal

Solikin M. Juhro and Masagus M. Ridhwan¹

Indonesian Abstrak

Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa dan oleh karenanya memerlukan langkah luar biasa untuk menanganinya. Diperlukan pemikiran yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung implementasi strategi pembangunan yang dipakai selama ini. Selain itu, untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks, perspektif pembangunan ekonomi nasional juga perlu ‘*di-reset*’, atau lebih diarahkan untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi, yang tentunya berjalan paralel dengan upaya penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Perspektif dimaksud menitikberatkan pada azas inklusivitas secara *holistic* guna mengurangi potensi disparitas pembangunan, yang secara khusus ditujukan melalui beberapa strategi kebijakan yaitu: (i) pengembangan infrastruktur dan perluasan pelayanan publik, (ii) pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat luas (kerakyatan), dalam hal ini melalui langkah penguatan usaha kecil, mikro dan menengah, termasuk yang berbasis syariah, (iii) percepatan digitalisasi dan penguatan inovasi/riset, (iv) pengembangan modal manusia dengan memanfaatkan peluang bonus demografi, serta (v) penguatan faktor kelembagaan inklusif, termasuk revitalisasi kerjasama, yang kesemuanya berbasis pada potensi perkembangan ekonomi digital serta sejalan dengan prinsip *less-contact economy* di era kenormalan baru ke depan.

Keyword: Pembangunan Ekonomi, Ekonomi Inklusif, Pandemi Covid-19, New Normal

English Abstract

The Covid-19 pandemic is an extraordinary event and therefore requires extraordinary measures to handle it. Comprehensive and integrated framework is needed to support the implementation of current development strategy. Apart from that, in facing the increasingly complex challenges ahead, the perspectives of national economic development also need to be 'reset', or more directed at overcoming socio-economic problems, which runs parallel to deal with health issues due to the pandemic. Holistically, these perspectives should be focused on inclusivity in order to reduce potential disparities in economic development. Several policy strategies should be addressed, namely: (i) developing infrastructure and public services, (ii) empowering the economic base for a wider community, e.g. through strengthening small, micro, and medium enterprises, including those based on sharia principles, (iii) accelerating digitalization and strengthening innovation/research activities, (iv) developing human capital by taking advantage of demographic dividend, and (v) strengthening inclusive institutional factors, including revitalizing cooperation.

Keywords: Economic Development, Inclusive Economy, Covid-19 Pandemic, New Normal

JEL: O11, O20, O30, P41

¹ Bank Indonesia Institute – Bank Indonesia. Views expressed in this paper are of the authors and do not reflect the views of Bank Indonesia or its Board of Governors.

I. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bersama, dalam satu dekade terakhir pasca periode krisis keuangan global 2008/09 kinerja perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif, pertumbuhan ekonomi tetap meningkat dan ditopang stabilitas ekonomi yang terjaga. Indikator kesejahteraan seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan juga menurun. Perkembangan positif tersebut tidak terlepas dari pengelolaan makroekonomi yang disiplin serta penguatan struktur ekonomi yang terus ditempuh secara konsisten. Walaupun demikian, tantangan perekonomian ke depan tetap tidak ringan. Setelah diterpa krisis keuangan global 2008/09, ekonomi global cenderung tumbuh stagnan dan memasuki *a new norm*, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan tren jangka panjangnya. Kondisi pasar keuangan dunia juga masih diliputi oleh ketidakpastian yang sangat tinggi. Banyak pihak menyebut bahwa dunia saat ini telah berubah dengan cepat dan telah memasuki lingkungan baru dengan *Volatility* (volatilitas), *Uncertainty* (ketidakpastian), *Complexity* (kompleksitas), dan *Ambiguity* (kerancuan) yang terus meningkat; dikenal dengan terminologi VUCA. Ke depan, tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian dunia akan semakin berat dengan hadirnya revolusi teknologi dan digital, perubahan peta kekuatan perekonomian dunia, serta berbagai dinamika geopolitik global.

Tantangan yang sudah merupakan keniscayaan adalah pesatnya peningkatan peran teknologi digital dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia (transformasi digital). Perkembangan ini perlu dicermati karena selain dapat berdampak positif dalam meningkatkan kenaikan efisiensi dan produktivitas perekonomian, teknologi digital juga dapat membawa disrupsi dalam perekonomian apabila tidak dikelola dengan baik. Perkembangan teknologi digital makin menambah tantangan bagi perekonomian yang bersumber dari global dan domestik. Dari global, tantangan bersumber dari produktivitas yang menurun, kebijakan *inward looking* yang meluas, dan ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Sementara tantangan dari domestik berhubungan dengan kinerja sektor industri pengolahan yang belum kuat, daya dukung infrastruktur yang masih terbatas, sumber pembiayaan domestik yang belum optimal, serta kualitas sumber daya manusia yang perlu terus dikembangkan.

Permasalahan tidak berhenti disitu, karena dunia saat ini mengalami krisis kesehatan yang sangat dahsyat akibat penyebaran pandemi Covid-19 yang mulai muncul sejak akhir 2019 di China. Sebagaimana diketahui, wabah Covid-19 adalah pandemi skala global pertama yang disebabkan oleh virus², yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis dengan kerugian yang signifikan baik secara khusus di sektor kesehatan, namun juga menjalar ke hampir seluruh sektor ekonomi secara global, dan bahkan membesar menjadi krisis multidimensional serta diikuti dengan implikasi biaya sosial yang sangat tinggi. Pandemi Covid-19 ini juga telah mengingatkan kita dengan sangat jelas betapa rapuhnya sistem buatan manusia yang paling mendasar, yaitu kesehatan. Kondisi ini terlihat di awal masa pandemi, seluruh dunia mengalami masalah

² Spanish Flu terjadi pada 1930 namun hanya di Eropa dan Asia.

kekurangan masker, alat tes, ventilator dan barang-barang vital lainnya, sehingga berdampak vital pada masyarakat khususnya pekerja lapangan yang berada di garda terdepan, seperti: buruh pabrik, pekerja informal dll.) dan masyarakat umum terpapar/terinfeksi oleh virus tersebut, serta bahkan menimbulkan tingkat fatalitas yang tertinggi sepanjang sejarah di dunia.³ Lebih lanjut, akibat pandemik ini adalah terganggunya (terhentinya) seluruh sistem produksi, keuangan, dan transportasi, sebagai akibat dari kombinasi guncangan yang dahsyat baik dari sisi penawaran dan permintaan. Dampak sosial-ekonomi akibat wabah virus ini tergolong sangat berat dan multi-dimensi, yang dapat menimbulkan risiko tinggi bagi stabilitas ekonomi dan politik nasional, khususnya sebagai akibat peningkatan ketimpangan/kesenjangan ekonomi.

Dampak Covid-19 berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan sosial, terutama bila pemerintah tidak hati-hati dalam membuat formulasi kebijakan. Sektor informal dan UMKM yang signifikan menyerap tenaga kerja merupakan yang paling terganggu oleh dampak pandemi Covid-19. Dalam pemikiran terkini, problem kesenjangan yang terjadi di tengah transformasi digital yang tidak terbandung memunculkan perlunya mewujudkan agenda pengaturan ulang secara masif untuk mengikis jarak sosial ekonomi dan tatanan politik dunia untuk kebaikan bersama, yang dikenal dengan terminology ‘*great reset*’ (WEF, 2020).

Paper ini memaparkan beberapa perspektif atau pemikiran mengenai pembangunan ekonomi inklusif di era kenormalan baru. Menyambung bagian pendahuluan ini, dua bagian selanjutnya memaparkan perubahan lingkungan strategis dan tantangan di masa pandemi, di satu sisi, serta tinjauan modalitas yang dimiliki perekonomian nasional, di sisi lain. Perubahan lingkungan strategis yang dihadapi perekonomian nasional antara lain melingkupi kondisi infrastruktur dasar dan pelayanan publik, pendidikan dan modal SDM, pemberdayaan ekonomi rakyat, kegiatan inovasi dan riset, serta faktor kelembagaan. Sementara itu, tinjauan terhadap modalitas perekonomian nasional mencakup kekayaan alam (SDA), modal budaya (*social capital*), populasi dan bonus demografi, serta potensi pengembangan ekonomi syariah. Bagian berikutnya memaparkan rumusan paradigma yang menjangkar lingkungan strategis dan modalitas perekonomian, terutama prioritas strategi kebijakan dalam mengawal era kenormalan baru. Bagian penutup memaparkan beberapa isu penting dalam mendorong keberhasilan implementasi dari strategi yang digunakan.

³ Jumlah kematian 1,29 juta jiwa Per 13 November 2020 (sumber: Google Coronavirus (COVID-19) statistics data).

II. Tantangan Perubahan Lingkungan Strategis di Era Pandemi

Berbagai perubahan lingkungan strategis, di bidang ekonomi dan non-ekonomi, pada dasarnya perlu disikapi dan direspons dengan tepat sehingga dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan inklusif. Indonesia yang maju dan inklusif bermakna bahwa perekonomian Indonesia didukung stabilitas yang terjaga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketahanan eksternal yang kuat, dan kesejahteraan masyarakat luas yang meningkat. Stabilitas perekonomian, baik stabilitas harga maupun stabilitas sistem keuangan, yang terjaga menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ketahanan eksternal yang kuat yang tercermin pada neraca pembayaran surplus serta struktur pembiayaan luar negeri yang sehat, diperlukan untuk memitigasi risiko ketidakpastian global. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat berupa angka pengangguran dan kemiskinan yang turun, serta ketimpangan antar kelompok pendapatan masyarakat dan antar wilayah di Indonesia yang mengecil, diperlukan agar hasil pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Bagian ini memaparkan beberapa perubahan lingkungan strategis dan tantangan di masa pandemi yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan ekonomi yang optimal.

2.1. Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik

Infrastruktur fisik mempunyai peranan yang sangat strategis dalam suatu negara, terutama karena membantu “menjembatani” bergeraknya roda kegiatan ekonomi, dalam hal ini menghubungkan mobilitas barang dan jasa antar lokasi geografis, ataupun memberikan dukungan (prasarana) untuk terlaksananya aktivitas kegiatan antara manusia. Dari kaca mata ekonomi, infrastruktur fisik merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah, antara lain meliputi jalan, jembatan, dan pengairan dan lainnya (Mankiw, 2003). Todaro (2006) juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas. Secara empiris, sejumlah studi juga menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara investasi infrastruktur dengan produktivitas *output* yang dihasilkan.

Namun demikian, meskipun telah disadari betapa pentingnya ketersediaan infrastruktur fisik untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, namun kondisi infrastruktur di nusantara masih menghadapi sejumlah tantangan khususnya terkait pembebasan lahan, pendanaan, regulasi yang dirasa masih belum *investor-friendly*, dll. Dalam *Global Competitiveness Report 2019*, yang dipublikasikan oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati urutan ke-72 dari 141 negara dalam hal pembangunan infrastruktur, atau relatif berada pada standar rata-rata. Kondisi ini juga mengindikasikan daya saing kita yang relatif belum sebaik dibandingkan dengan negara jiran khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai kompetitor dalam menarik investasi asing.

Selain infrastruktur terkait daya saing ekonomi dan investasi, infrastruktur fisik di bidang kesehatan dan pelayanan masyarakat (publik) juga sangat diperlukan, dan bahkan menjadi faktor

kunci untuk mencapai keberhasilan pembangunan kualitas SDM Indonesia. Sebagaimana diketahui, World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Dengan demikian, infrastruktur kesehatan dapat dibagi menjadi infrastruktur kesehatan fisik dan pendukungnya serta infrastruktur kesehatan non fisik. Infrastruktur kesehatan fisik meliputi bangunan rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek obat, dan sebagainya, sedangkan infrastruktur fisik pendukung meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat. Infrastruktur kesehatan non fisik adalah ketersediaan tenaga medis di rumah sakit, puskesmas, dan klinik, aksesibilitas, dan sebagainya.

Untuk mencapai tingkat kesehatan (angka harapan hidup dan IPM) yang tinggi, salah satu faktor kuncinya adalah ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai.⁴ Akses menuju rumah sakit/puskesmas/klinik di Indonesia saat ini masih cukup terbatas, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 52,9 % rata-rata penduduk Indonesia merasa sulit/sangat sulit untuk mendapatkan akses ke rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (seperti: puskesmas/klinik). Namun, angka tersebut relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan penduduk perdesaan, yang menyatakan 85,4 % merasa sulit/sangat sulit untuk mengakses rumah sakit. Selain infrastruktur fisik, infrastruktur non fisik juga mempunyai peranan yang sangat vital untuk penyediaan pelayanan publik ini. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 2019, terdapat 1,18 juta sumber daya manusia kesehatan yang terdiri dari 73,13 % orang tenaga kesehatan dan 26,87% orang tenaga pendukung kesehatan.⁵

Kondisi infrastruktur kesehatan yang relatif sangat terbatas tersebut, kemudian dengan terjadinya wabah serangan virus Covid-19 yang datang secara tak terduga dan menular secara cepat/masif, telah menyebabkan tidak tertampungnya lonjakan pasien di rumah sakit, dan bahkan tercatat sejumlah kasus fatalitas (kematian). Rasio tempat tidur rumah sakit dan dokter terhadap jumlah penduduk di Indonesia relative sedikit dibandingkan dengan negara tetangga.

Terdapat ketidakseimbangan yang signifikan dalam aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan antar wilayah, yang akan membuat penanganan Covid-19 semakin sulit ketika kasus menyebar secara luas ke seluruh wilayah dan ke pedesaan.⁶ Saat ini tingkat keterisian tempat tidur

⁴ Salah satu *proxy* utama untuk melakukan pengukuran tingkat kesehatan suatu negara adalah angka harapan hidup. Ukuran ini merupakan salah satu dari tiga komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup Indonesia pada tahun 2018 berada di angka 71,5 tahun, sedikit di atas Filipina yang berada di angka 71,1 tahun, sedangkan negara tetangga lain seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura berada di angka lebih besar dari 75 tahun. Selain itu, skor IPM Indonesia pada tahun 2018 sebesar 0,71 berada di peringkat 6 ASEAN, di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nilai tersebut membuat Indonesia masuk dalam kategori pembangunan tinggi menurut United Nations Development Programme (UNDP).

⁵ Proporsi terbanyak dari tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga keperawatan sebanyak 29,23 % dari total tenaga kesehatan. Dari total tenaga kesehatan tersebut, terdapat sekitar 95 ribu dokter yang terbagi menjadi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2019 memiliki rasio +/- 0,35 dokter per 1000 penduduk; relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan Malaysia sebesar 1,5 dokter per 1000 penduduk; Singapura sebesar 2,3; dan Thailand sebesar 0,8.

<https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS>.

⁶ Menggunakan indeks komposit dari 30 indikator kesehatan masyarakat, Suparmi dkk. (2018) menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat pembangunan sangat bervariasi antar provinsi, dengan nilai indeks berkisar dari 44 di Provinsi

di Indonesia juga cukup tinggi. Dengan membandingkan kapasitas tempat tidur di rumah sakit dengan jumlah pasien isolasi, indikator *bed occupancy rate* (BOR) dapat dibuat untuk melihat seberapa tinggi kapasitas rumah sakit sudah terpenuhi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 5 September 2020, BOR di Indonesia berada di angka lebih dari 40 %. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali memiliki BOR tertinggi dengan angka di atas 80 %.

Penanganan pandemi ini tentu sangat membutuhkan peranan vital dari tenaga kesehatan, khususnya meliputi kegiatan operasional rumah sakit, dan penanganan pasien Covid-19. Dengan semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, maka beban tenaga keperawatan dan tenaga medis akan semakin berat, hingga tercatat sejumlah tenaga kesehatan juga turut menjadi korban.⁷ Selain terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang ada, kekurangan alat pelindung diri untuk tenaga medis di berbagai fasilitas kesehatan juga masih dirasakan tenaga medis hingga saat ini.⁸ Hal-hal tersebut berimplikasi pada bertambahnya kebutuhan penambahan infrastruktur fisik, terutama rumah sakit darurat untuk penanganan pasien. Selain itu, peningkatan keamanan dan keselamatan bagi tenaga medis yang terus menangani pasien Covid-19 juga semakin bertambah, agar ketahanan infrastruktur kesehatan Indonesia dalam menghadapi pandemi ini dapat dijaga dan ditingkatkan.

2.2. Basis Ekonomi Kerakyatan

Sektor UMKM mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif di tanah air. Berdasarkan piramida struktur pelaku usaha di Indonesia di dominasi oleh UMKM (99%), dengan kontribusi sebesar 62% terhadap perekonomian nasional pada tahun 2018. UMKM Indonesia menyumbang hampir 97% pekerjaan rumah tangga dan 56% dari total investasi bisnis, dengan penyerapan lapangan kerja sebanyak 97% dari total angkatan kerja. Di sisi lain, kontribusi UMKM terhadap ekspor belum dapat memberikan dampak yang signifikan yaitu baru mencapai 14% terhadap ekspor nasional. Konsern atau harapan utama dari keberadaan UMKM adalah bagaimana mengoptimalkan jumlah UMKM yang besar sehingga dapat berkontribusi secara lebih maksimal terhadap PDRB dan ikut mendukung penciptaan lapangan kerja.

Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh UMKM nasional, baik konvensional maupun syariah, adalah: (i) perluasan akses pasar: jangkauan pasar sebagian besar UMKM adalah pasar lokal di tingkat kabupaten atau kota. Hanya sebagian kecil UMKM dapat menjangkau pasar di tingkat provinsi atau antar provinsi. Hal ini disebabkan keterbatasan akses informasi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas; (ii) keterbatasan kapasitas: UMKM umumnya menghadapi keterbatasan faktor-faktor produksi, khususnya faktor modal dan kemampuan

Papua hingga 65 di Provinsi Bali. Secara umum, provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki tingkat kesehatan dan layanan kesehatan yang di bawah standar. Selain antar provinsi, tingkat ketimpangan kondisi dan layanan kesehatan antar daerah di dalam suatu provinsi relatif tinggi.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200907133513-20-543596/idi-184-tenaga-kesehatan-meninggal-selama-pandemi-corona>.

⁸ <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/ita-malau/ironi-pandemik-nakes-terus-berguguran-karena-apd-minim-dan-kelelahan-regional-jabar/2>

manajerial. Hal ini tidak terlepas dari asal muasal UMKM yang berawal dari usaha mikro sehingga sangat bertumpu pada kemampuan perorangan; (iii) tantangan pembiayaan: keterbatasan modal UMKM seharusnya dapat dipenuhi dari pendanaan eksternal. Namun demikian masih terdapat gap antara UMKM dan lembaga pembiayaan formal, khususnya perbankan.

Memperhatikan tantangan/permasalahan UMKM tersebut, Pemerintah maupun lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga negara telah berupaya untuk menyusun kebijakan yang dapat mengatasi hal tersebut, dan dari kaca mata UMKM juga diketahui bahwa kebijakan tersebut relatif bermanfaat dalam upaya mengatasi kendala dan kelemahan-kelemahan dalam meningkatkan produktivitas UMKM. Namun demikian, dalam upaya akselerasi kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan nilai tambah UMKM bagi perekonomian nasional, UMKM dan pelaku usaha memandang masih terdapat ruang-ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan tersebut. Perbaikan dan penyempurnaan tersebut utamanya adalah untuk menjembatani gap antara kebijakan tersebut dan kondisi real UMKM.

Selain itu, besarnya populasi konsumen Muslim di Indonesia, UMKM yang bergerak di industri syariah memiliki potensi dan peluang yang sangat besar. UU no. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal, termasuk untuk UMKM serta program subsidi sertifikat halal dari KemenkopUKM dan Pemerintah Daerah Provinsi tertentu yang dapat menjadi landasan untuk UMKM syariah untuk semakin berkembang. Walaupun demikian, sebagian konsumen muslim Indonesia masih dianggap kurang memiliki *ownership* akan pentingnya konsumsi produk halal. Sementara itu, dari sisi pedagang/produsen, sebagian besar menyatakan masih terdapat kendala dalam melakukan proses Sertifikasi Halal. Banyak pengusaha UMKM yang merasa sertifikasi halal tersebut mahal biayanya, sehingga pelaku usaha enggan untuk mendapatkannya. Padahal, KemenkopUKM telah mengumumkan kebijakan sertifikasi halal tersebut gratis. Hal ini dapat mengindikasikan masih belum ada koordinasi yang baik antara kebijakan pemerintah untuk memberikan sertifikasi halal secara gratis dengan persepsi pelaku UMKM yang masih menganggap sertifikasi halal sebagai hal yang memakan waktu dan biaya.

Di era pandemi saat ini, UMKM merupakan jenis usaha yang paling terkena dampak negatif dari krisis kesehatan ini dibandingkan dengan korporasi. Guncangan atau *shock* pada sektor UMKM terjadi melalui jalur pelemahan permintaan dan kenaikan biaya produksi yang turut memperberat kendala klasik dalam pengembangan UMKM, yaitu pemasaran dan akses keuangan. Seiring dengan terjadinya pelemahan permintaan konsumsi masyarakat, omzet penjualan UMKM turut mengalami penurunan. Kendala perolehan *supply* bahan baku dan pembatasan distribusi akibat pembatasan sosial pada seluruh daerah berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan biaya pengiriman produk. Kendala UMKM pada kondisi pandemi ini pun menimbulkan penurunan pendapatan yang mengakibatkan terganggunya arus kas (*cashflow failure*) UMKM. Di sisi lain, kesulitan pembiayaan yang dialami pelaku UMKM mendorong terjadinya penurunan produksi, pengurangan alokasi biaya pemasaran dan pengurangan tenaga kerja yang masif.

2.3. Kegiatan Inovasi dan Riset

Pentingnya inovasi bagi perekonomian suatu negara, secara teoretis mengacu kembali pada Schumpeter (1911), yang intinya menyatakan bahwa keberadaan inovasi memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pembangunan ekonomi, atau bukan sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan cenderung lebih merefleksikan peningkatan *output* yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam teknologi produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan *output* yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan *output* yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para dunia usaha (melalui tenaga peneliti), dan bukan hanya sebagai implikasi dari perubahan teknologi, tetapi inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru atau penetrasi ke pasar baru. Dengan semangat kewirausahaan, dunia usaha yang inovatif mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, ataupun memperluas usaha yang telah ada. Penciptaan produk baru dan sekaligus menghancurkan produk lama sebagai implikasi dari kreativitas/inovasi iptek yang dikuasai oleh pihak swasta (korporat), teori ini sangat relevan dengan Teori Pertumbuhan Endogen (Romer, 1987; 1990) dimana unsur teknologi itu tidak dapat dijelaskan (hanya sebagai residual), tetapi bahkan dapat terus dikembangkan dan diperbaharui sejalan dengan adanya penemuan hasil riset yang baru. Teori pertumbuhan endogen menggarisbawahi pentingnya investasi dalam modal manusia, inovasi, dan pengetahuan merupakan kontributor signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa inovasi adalah mesin bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan produktivitas *output*.⁹ Inovasi terutama berasal dari hasil riset yang memerlukan waktu, baik jangka menengah-panjang, yang dilakukan oleh peneliti yang andal/berkompetensi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengutip dari LIPI: “Tanpa riset, tak ada inovasi. Tanpa inovasi, bangsa akan sangat bergantung pada produk teknologi bangsa-bangsa lain”.¹⁰ Selain itu, inovasi juga dapat menciptakan efisiensi dalam perekonomian, sehingga produk yang dihasilkan akan lebih bersaing untuk menembus pasar global. Hasil studi empiris mengenai pertumbuhan ekonomi endogen di Indonesia membuktikan peran penting kegiatan inovasi dan riset terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam 50 tahun terakhir (Juhro et al, 2020a).

Bagi negara kita Indonesia, dengan struktur demografi yang mayoritas sekitar dua pertiga berada pada usia produktif, inovasi merupakan faktor penentu, agar jangan sampai masuk ke dalam *middle income trap* (jebakan kelas menengah). Bonus demografi yang kita miliki saat ini hingga tahun 2030/2035 nanti merupakan kesempatan emas yang seharusnya tidak boleh kita lewatkan saja, karena implikasinya akan sangat berat bagi generasi bangsa di masa depan. Selain faktor

⁹ Hasil studi World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2018 menyimpulkan bahwa kenaikan 1 % belanja penelitian dan pengembangan (litbang) akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % di negara-negara maju. Sedangkan di negara-negara berkembang, kenaikan 1 % belanja litbang akan memacu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), meski dengan persentase lebih kecil, yaitu antara 0,3 % dan 0,62 %.

¹⁰ <http://lipi.go.id/lipimedia/riset-dan-inovasi-tak-terarah/16288>

SDM, negeri kita juga diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, dan jika tidak diolah/ditingkatkan nilai tambahnya, sudah pasti akan membuat lemahnya daya saing kita. Pasar kita yang besar akan dibanjiri oleh produk manufaktur impor dengan nilai tambah tinggi, sementara kita ekspor komoditas mentah dengan nilai tambah yang rendah. Implikasinya, terlihat dari *current account* kita yang cenderung mengalami defisit yang persisten selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan *Global Innovation Index* di tahun 2020 ini menunjukkan peringkat Indonesia masih relatif rendah berada di posisi 85 dari 131 negara yang disurvei, atau belum banyak perubahan dari tahun 2017 berada di posisi 87. Bila dibandingkan khusus dengan negara berpendapatan menengah ke bawah, kita berada di posisi nomor 9 dari total 29 negara; dimana Vietnam menempati posisi 1 dan Filipina posisi 4. Kondisi ini tentu harus dicermati secara mendalam, karena implikasinya juga kepada daya saing kita, sebagaimana publikasi *Global Competitiveness Index* (2019) menempatkan Indonesia pada posisi 50 dari 141 negara.¹¹ Kelemahan inovasi domestik terutama pada pilar kesiapan teknologi dan pilar inovasi. Indikator lain seperti kontribusi teknologi tinggi terhadap ekspor manufaktur juga masih rendah. Sumber daya Iptek yang meliputi pendanaan, jumlah dan kualitas peneliti dan perekayasa, hingga tingkat produktivitas Iptek yang berkaitan dengan paten dan publikasi ilmiah juga masih belum optimal.

Permasalahan lain terkait litbang dan inovasi adalah pendanaan yang masih sangat kecil, Indonesia menginvestasikan 0,24% dari PDB (2017) dan sebagian besar berasal dari pemerintah. Pesaing regional seperti: Vietnam (0,5%) dan Singapura (2,2%), sementara Australia (1,9%).¹² Meskipun pada Pasal 59 dalam Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan (UU Sisnas Iptek) telah mengamanatkan dana abadi penelitian sebagai salah satu sumber pendanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi, namun implementasinya saat ini masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, kurangnya sinkronisasi data penghitungan belanja litbang nasional. Dari Rp24,92 triliun dana riset pemerintah pusat pada 2016, hanya 43,74 % yang digunakan sebagai dana untuk penelitian. Selebihnya pendanaan digunakan untuk operasional, jasa iptek, belanja modal, dan pendidikan dan pelatihan (diklat). Kedua, belum ada mekanisme jelas untuk pengukuran kinerja lembaga penelitian. Sebagai ilustrasi, dana pemerintah pusat sebesar Rp24,92 triliun untuk riset tersebar di 81 Kementerian dan Lembaga (K/L), sementara hanya 13 K/L yang melakukan kegiatan litbang penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek. Ketiga, belum ada lembaga independen yang fokus mengelola pendanaan penelitian. Lembaga pendanaan riset nasional yang ada saat ini memiliki keterbatasan dalam jumlah dan kualitas. Keempat, selain karena keterbatasan ruang fiskal kendala juga terjadi karena riset belum merupakan prioritas dalam politik anggaran. Kelima, masih rendahnya kontribusi industri atau swasta pada kegiatan penelitian di Indonesia.¹³

¹¹ Sumber: World Economic Forum (WEF)

¹² Sumber: World Bank (2018) dan OECD (2018)

¹³ Sumber: <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/06/ksi-1593486721.pdf>

Di era pandemi Covid-19 saat ini, akan sangat berpotensi menekan perkembangan/kinerja inovasi dan litbang nasional terutama dari sisi pendanaan, terutama mengingat sumber pendanaan riset/inovasi terbesar berasal dari keuangan pemerintah, yang pada saat ini lebih difokuskan pada penanganan dampak pandemi ini. Akan tetapi, di balik krisis kesehatan ini, sejatinya inovasi dan riset mempunyai peranan yang sangat vital untuk menjadi *champions* terutama di sektor kesehatan, transportasi, pangan, energi dan infrastruktur.

2.4. Pendidikan dan Modal Manusia

Secara teoretis, modal manusia atau sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan utama dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terutama karena modal SDM berbasis pada kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat direplikasi/dikembangkan tanpa batas ruang dan waktu.¹⁴ Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu fokus utama pembangunan di Indonesia, dan hal ini terindikasi dari anggaran pemerintah untuk pendidikan telah meningkat pesat selama dua dekade terakhir, dengan mengalokasikan 20 % untuk anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja pemerintah. Namun, bila dilihat dari rasio belanja pendidikan terhadap PDB, Indonesia hanya membelanjakan rata-rata 3 % dari PDRB-nya untuk pendidikan selama lima tahun terakhir. persentase tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (4,1%); Malaysia (4,8 %); dan Vietnam (5,65%).

Terlepas dari soal rasio belanja tersebut,¹⁵ secara kuantitas, angka partisipasi sekolah di Indonesia berada di level yang cukup tinggi di antara negara ASEAN dengan angka partisipasi bersih sekolah dasar sebesar 97,6% dan 78,8% untuk sekolah menengah pada tahun 2018. Meskipun anggaran dan partisipasi pendidikan di Indonesia telah meningkat secara signifikan, namun dari segi kualitas, performanya masih perlu ditingkatkan lagi. Terlebih lagi jika mengacu dari hasil skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) untuk Indonesia tahun 2018 bidang literasi, matematika dan sains, Indonesia hanya mampu menempati posisi 70 dari 78 negara.¹⁶ Jika tidak ada lompatan besar di bidang pendidikan, Indonesia dengan tren saat ini hanya akan mencapai skor rata-rata negara OECD dalam 50 tahun. Selain masalah anggaran yang masih relatif rendah, relatif rendahnya kualitas pendidikan nasional juga berkorelasi kuat dengan masih relatif rendahnya kompetensi guru. Hingga tahun 2018, masih sekitar 20 % guru yang memiliki jenjang pendidikan di bawah Strata-1 (S1). Juga, masih banyak guru yang kekurangan

¹⁴ Berangkat dari Model Solow (1956), Romer (1987; 1990) membangun model pertumbuhan ekonomi endogen (*endogenous growth theory*) yang menitikberatkan pentingnya modal manusia di atas modal fisik kapital.

¹⁵ Dengan adanya tambahan alokasi untuk pendidikan dimaksud, terjadi peningkatan alokasi sumber daya ke sekolah-sekolah dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan mendukung para orang tua yang mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Antara 2001 dan 2017, partisipasi sekolah meningkat sebesar 23 %, atau 10 juta siswa. Pada 2015, rata-rata lama sekolah berada di angka 8 tahun, meningkat dua kali lipat dibanding rata-rata lama sekolah pada tahun 1990.

¹⁶ Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development / OECD (2019).

pengetahuan mata pelajaran dasar dan keterampilan pedagogis untuk menjadi pendidik yang efektif.¹⁷

Di era pandemi Covid-19 saat ini, tantangan pengembangan SDM Indonesia semakin kompleks, kegiatan belajar mengajar yang tadinya dilakukan di sekolah harus untuk sementara diberhentikan. Kegiatan belajar mengajar yang dialihkan ke media daring ini menyebabkan timbulnya beberapa masalah baru, terutama ketersediaan jaringan internet, kesiapan guru dan murid dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, dan potensi putus sekolah bagi murid dari keluarga yang terkena PHK atau kehilangan mata pencaharian akibat pandemi ini. Kebijakan belajar dari rumah (BDR) sebagai respons dari pandemi Covid-19 memiliki dampak serius kepada siswa dan guru. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) berisiko menghambat bahkan menghentikan proses pembelajaran bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil karena keterbatasan akses internet dan biaya yang harus dikeluarkan setiap murid. Sekolah dan murid-murid yang tidak memiliki fasilitas memadai mengalami kesulitan melanjutkan proses belajar-mengajar. Hal tersebut berpotensi meningkatkan disparitas pendidikan. Kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia telah menyusun sejumlah kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi di sektor pendidikan, termasuk pembentukan kurikulum darurat, menggeser tahun ajaran baru, dan pemberian bantuan pulsa internet secara gratis.

Akses internet adalah hal yang vital bagi proses PJJ, kecepatan dan stabilitas koneksi dari internet menjadi prasyarat utama bagi pembelajaran jarak jauh yang efektif. Hal ini tentunya menjadi kendala apabila dilihat secara nasional. Banyak wilayah di Indonesia belum dijangkau oleh internet, bahkan sinyal komunikasi dan listrik pun belum mencapai di sejumlah daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).¹⁸ Selain permasalahan akses internet, dampak Covid-19 pada perekonomian telah meningkatkan jumlah penduduk miskin.¹⁹ Terdapat potensi murid-murid sekolah yang akan putus sekolah karena ketidakmampuan orang tuanya untuk membayar sekolah maupun karena bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Estimasi dari World Bank²⁰ memprediksi akan terdapat 91 ribu anak yang putus sekolah akibat *negative shock* Covid-19

¹⁷ Pada tahun 2012, pemerintah pusat memperkenalkan uji kompetensi bagi guru untuk menilai pengetahuan mata pelajaran dan keterampilan pedagogis mereka. Hampir tiga juta guru yang mengikuti tes pada tahun 2015 memiliki nilai rata-rata 53,02; di bawah target yang ditentukan yaitu 55. Pemberlakuan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen mengarah pada pengenalan program sertifikasi guru yang menghubungkan kenaikan gaji dengan peningkatan kualifikasi dan keterampilan. Namun, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa efektivitas program ini relatif rendah.

¹⁸ Persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan mencapai 66% pada tahun 2018. Meskipun begitu, terlihat adanya disparitas yang cukup tinggi antara akses internet di pedesaan dan perkotaan yaitu 52% di pedesaan dan 78% di perkotaan pada tahun 2018. Disparitas akses tersebut dapat dilihat ketika membandingkan beberapa provinsi di Indonesia. DKI Jakarta memiliki penetrasi internet sebesar 89%. Sedangkan masih ada beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia yang memiliki penetrasi internet di bawah 50%, dengan Provinsi Papua sebagai provinsi dengan tingkat penetrasi yang terkecil di angka 29%.

¹⁹ Sebanyak hampir 2 juta penduduk pada Maret 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,42 juta orang dibanding 24,78 juta orang pada September 2019.

²⁰ Azevedo, J.P., Hasan, A., Goldemberg, D., Iqbal, S.A., and Geven, K., (2020). Simulating the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes, World Bank, Jakarta.

terhadap pendapatan. Implementasi kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lapangan juga tidak mudah. Dalam praktik, banyak tenaga pengajar yang tidak dilatih dan tidak mengetahui cara penggunaan sarana pembelajaran daring. Selain itu, terdapat beberapa poin tentang pelaksanaan PJJ termasuk imbauan agar guru tidak terlalu membebani murid dengan capaian yang sesuai dengan kurikulum dan penilaian yang bersifat timbal balik menyesuaikan dengan kebutuhan murid.

2.5. Faktor Kelembagaan

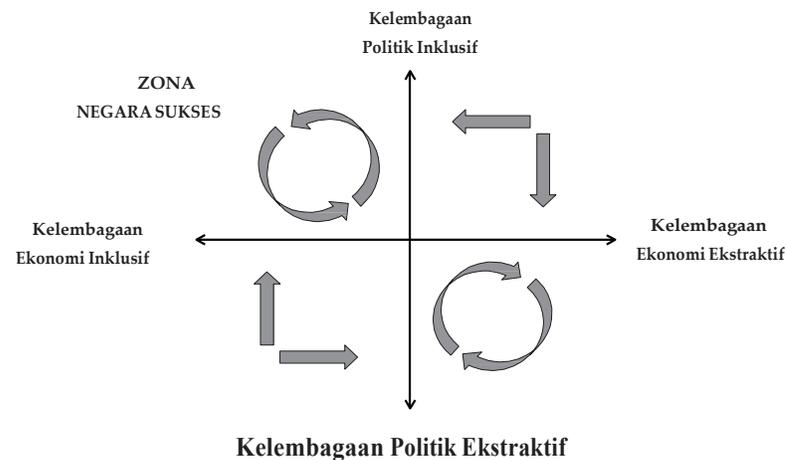
Faktor kelembagaan/institusi merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Acemoglu dan Robinson (2012) menyimpulkan bahwa sukses atau gagalnya suatu negara bukan ditentukan oleh kebudayaan, iklim, geografi, tingkat kepatuhan pada kebijakan, ataupun agama, melainkan baik atau tidaknya pengelolaan kelembagaan ekonomi dan politik. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat besar kemungkinannya untuk terjadi dalam negara dengan kelembagaan yang inklusif, dibanding kelembagaan yang ekstraktif.

Secara analitis, terdapat empat kondisi kelembagaan yang tercipta sesuai dengan pilihan masyarakat, yaitu: (i) Kelembagaan ekonomi ekstraktif (*extractive economic institutions*). Kondisi dengan tatanan aturan dan hukum yang lemah, tidak adanya jaminan terhadap hak cipta, adanya kendala atau aturan yang menyebabkan tidak berfungsinya pasar dan menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. (ii) Kelembagaan politik ekstraktif (*extractive political institutions*). Kondisi yang mendekati batas absolutisme. Kelembagaan politik mendorong kekuasaan terkonsentrasi pada beberapa orang/grup tanpa mekanisme aturan main yang baik dan *checks and balances*; (iii) Kelembagaan ekonomi inklusif (*inclusive economic institutions*). Kondisi terjaminnya hak cipta, aturan dan hukum, dukungan pemerintah (pelayanan publik dan regulasi) untuk kegiatan pasar, keterbukaan pada kegiatan baru, serta akses yang tinggi pada pendidikan dan kesempatan maju bagi masyarakat luas. (iv) Kelembagaan politik inklusif (*inclusive political institutions*): kondisi dimana kelembagaan politik memungkinkan pluralisme dan partisipasi luas dari masyarakat, memberikan batasan (*check and balances*) dan aturan main pada politisi. Selain itu, pada tingkatan tertentu terdapat sentralisasi politik kepada negara untuk dapat menegakkan aturan dan hukum secara kolektif.

Terdapat sinergi kuat antara kelembagaan ekonomi dan politik. Dalam hal ini, sinergi kelembagaan yang inklusif (ekonomi dan politik) akan menciptakan kekuatan (*virtuous cycle*) yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan penyebaran kekuatan yg lebih luas, kelembagaan inklusif cenderung menempatkan kelembagaan ekonomi yang menyelelarkan pemanfaatan potensi sumber daya secara luas, menghilangkan kendala berusaha (*entry barriers*), dan mendorong kecenderungan berekerjanya pasar yang dapat memberikan keuntungan secara luas. Sinergi antara kelembagaan ekonomi dan politik yang ekstraktif juga akan menciptakan *feedback loop* (*vicious cycle*) yang kuat. Dalam hal ini, kelembagaan politik memungkinkan para elit mengontrol kekuasaan untuk mengatur/memilih kelembagaan ekonomi

yang memiliki kemampuan dan potensi oposisi relatif terbatas. Mereka juga mampu mengatur pergeseran/perubahan struktur kelembagaan politik. Sebaliknya, kelembagaan ekonomi ekstraktif cenderung memperkaya sesama elit, serta kekayaan dan kekuatannya memungkinkan mereka untuk mengkonsolidasikan dominasi politik.

Gambar 1. Keterkaitan Kelembagaan Politik dan Ekonomi



Sumber: Juhro (2013)

Realitanya khususnya di negara kita, terjadinya sinergi kelembagaan ekonomi dan politik yang ekstraktif merupakan salah satu fenomena yang cukup sering kita dengar/baca khususnya dari pemberitaan surat kabar/media massa. Dengan adanya kelembagaan politik memungkinkan para elite mengontrol kekuasaan untuk mengatur/ memilih kelembagaan ekonomi yang memiliki kemampuan dan potensi oposisi relatif terbatas. Mereka juga mampu mengatur pergeseran/perubahan struktur kelembagaan politik. Sebaliknya, kelembagaan ekonomi ekstraktif cenderung memperkaya sesama elite, serta kekayaan dan kekuatannya memungkinkan mereka untuk mengkonsolidasikan dominasi politik. Hegemoni politik juga menciptakan lemahnya institusi penegakkan hukum (*law enforcement*). Paska kebijakan otonomi daerah, juga turut menciptakan *elite captures* di tingkat daerah, yang cenderung mempraktikkan sinergi kelembagaan bersifat ekstraktif ini.

Aspek utama lain terkait faktor kelembagaan ini adalah terkait koordinasi kebijakan baik antar sektor maupun antar instansi baik di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, mengacu pada GII (2020), salah satu faktor utama rendahnya skor inovasi nasional (ranking 85 dari 131 negara) terutama disumbang oleh faktor institusi. Sebagai contoh, topik riset yang sama tapi dikerjakan oleh beberapa instansi pemerintah yang berbeda, juga hasil riset suatu badan, namun instansi/kementerian terkait tidak mau menggunakan hasil riset tersebut, karena sudah ada badan

riset di bawah koordinasinya juga melakukan studi yang sama.²¹ Ego sektoral atau kurang terjalannya koordinasi antar instansi/lembaga pada akhirnya akan menimbulkan inefisiensi dan rendahnya produktivitas *output* yang dihasilkan.

Selanjutnya, aspek penting lain dari kelembagaan ini adalah faktor kepemimpinan. Di awal masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan terus menyebar ke Indonesia, dapat kita ketahui bersama bahwa respons kebijakan pencegahan dan penanggulangan krisis kesehatan ini cenderung berjalan relatif lambat dan bahkan sejumlah pemimpin / figur publik meragukan akan bahayanya pandemi ini, karena dianggap penyakit yang bisa sembuh sendiri.²² Fenomena *leadership* ini tentunya dapat menimbulkan kebingungan publik. Selain itu, di awal masa pandemi, dapat kita amati juga cukup banyak terjadi kelemahan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya soal penetapan PSBB di suatu daerah. Kondisi ini juga berpotensi menular pada perilaku kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protocol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Tentu perilaku indisipliner seperti ini bukan hanya disebabkan oleh faktor *followership*, namun juga disebabkan oleh faktor kesadaran individu itu sendiri yang masih rendah, meskipun pemerintah telah melakukan kampanye sosial dan himbauan secara intensif termasuk dengan pemberian sanksi, namun relatif masih juga ada yang melanggar.

III. Tinjauan Modalitas Perekonomian Nasional

3.1. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA)

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun potensi yang besar tersebut belum dikelola secara optimal. Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis di dunia dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa.²³ Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang 95 ribu kilometer. Tidaklah mengherankan, nusantara juga memiliki kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, terutama biota laut, bahan tambang dan galian. Indonesia memiliki ekosistem pesisir yang khas seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (*sea grass beds*).²⁴ Untuk bahan tambang, Indonesia juga memiliki jumlah cadangan

²¹ Badan Tenaga Atom Nasional memiliki penelitian benih padi varietas unggul, tetapi tak dimanfaatkan karena Kementerian terkait lebih memprioritaskan varietas padi unggul hasil riset Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di bawah subordinasinya (sumber: <http://lipi.go.id/lipimedia/riset-dan-inovasi-tak-terarah/16288>)

²² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302162005-20-479814/menkes-virus-corona-penyakit-yang-bisa-sembuh-sendiri>.

²³ Total luas hutan di Indonesia sebesar 128 juta ha, dengan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan selama jangka waktu 2011 hingga 2017 adalah sebesar 20,68 triliun rupiah, masih di bawah target yaitu sebesar 23,35 triliun rupiah. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Status Hutan & Kehutanan di Indonesia 2018. Jakarta

²⁴ Potensi ikan laut di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun dan potensi luas area budidaya laut sekitar 12,1 juta hektar. Sumber: [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SOSEK/buku/Final%20Amafrad%20Buku%20WPNNRI%20572%20\(secured\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SOSEK/buku/Final%20Amafrad%20Buku%20WPNNRI%20572%20(secured).pdf)

minyak sekitar 2,5 miliar barel pada tahun 2019, Indonesia memiliki cadangan gas terbesar ke-14 dunia dengan 103,3 triliun ton kubik dan memegang sekitar 40 % dari cadangan panas bumi dunia. Selain itu, Indonesia merupakan produsen emas terbesar ke-8 di dunia, memproduksi sekitar 100 ton / tahun menurut Survei Geologi AS 2013, produsen tembaga dan nikel terbesar ke-5, dan pengeksport gas alam cair (LNG) terbesar ke-2, setelah Cina.

Meskipun kaya dengan sumber daya alam tambang, untuk pemenuhan kebutuhan suplai energi nasional khususnya dari energi fosil seperti minyak bumi, Indonesia masih tercatat net impor sebesar 300 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan produksi minyak bumi yang terus menurun. Penurunan produksi itu disebabkan oleh sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang sudah tua, sementara produksi sumur baru masih terbatas. Permasalahan yang sama juga dihadapi oleh gas alam, meskipun negeri kita tercatat memiliki cadangan 98 triliun kaki kubik, namun potensi penemuan cadangan gas di dalam negeri juga menunjukkan penurunan karena cadangan gas baru belum mampu untuk dimanfaatkan. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan laut Natuna yang memiliki cadangan gas sebesar 40 triliun kaki kubik yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia.

Di sisi lain, produksi batu bara dapat dilakukan dengan metode ekstraksi yang tidak terlalu rumit dan lebih murah, sehingga lebih bernilai ekonomis bagi Indonesia. Karena hal tersebut dan lokasi geografisnya yang dekat dengan pasar negara berkembang seperti India dan Cina, Indonesia terus meningkatkan produksi batu baranya dalam 20 tahun terakhir. Mineral menjadi semakin penting untuk berbagai macam industri terutama di sektor elektronik. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia menerapkan larangan ekspor mineral mentah dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas industri penghasil di Indonesia. Mineral terpenting yang ditemukan dan diproduksi di Indonesia adalah timah, bauksit, nikel, emas, dan tembaga. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang dapat diolah sebagai bahan baku industri, aktivitas hilirisasi industri dapat meningkatkan nilai tambah dari bahan baku dalam negeri. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih berusaha untuk melakukan berbagai pelarangan ekspor bahan baku mentah terutama untuk mineral dan minyak sawit. Maka dari itu, dibutuhkan hilirisasi industri sumber daya alam.

Dalam jangka pendek, hilirisasi sumber daya alam akan memperbaiki defisit neraca perdagangan yang diakibatkan oleh ekspor bahan mentah yang pada akhirnya diimpor kembali dalam bentuk barang jadi. Hilirisasi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan berbagai industri pengolahan bahan baku yang menyebabkan masuknya investasi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan. Hilirisasi industri juga perlu diiringi dengan penguatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM dan penguasaan teknologi. Pengembangan industri di seluruh wilayah Indonesia juga perlu didorong melalui pembangunan berbagai kawasan industri. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam selama ini kurang berkembang, salah satunya karena masih terhambatnya regulasi pemerintah. Oleh karena itu, indeks *Ease of Doing Business* (EoDB) atau kemudahan berbisnis di Indonesia harus diperbaiki secara intensif agar investasi untuk hilirisasi dapat lebih mudah untuk masuk. Peringkat EoDB Indonesia berada pada posisi stagnan yaitu peringkat 72-73 dari tahun 2017 hingga 2020.

Meskipun kaya dengan SDA, tingkat perkembangan/kemajuan ekonomi Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan negara dengan karakteristik serupa, seperti: Australia, Malaysia, Brazil dan Afrika Selatan. Negara-negara tersebut relatif telah berhasil mengoptimalkan pemanfaatan SDA-nya untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, sebetulnya Indonesia juga bukan negara yang gagal dalam pemanfaatan SDA untuk kepentingan rakyatnya, dan kita cenderung lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara yang kaya SDA, namun justru terjadi konflik sosial dan keamanan yang berkepanjangan seperti yang terjadi di sejumlah negara Afrika. Hal ini mengindikasikan hubungan yang kontradiktif antara kekayaan sumber daya alam dan kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Di dalam teori ekonomi, fenomena semacam ini disebut sebagai *resource curse*, kekayaan SDA justru menjadi penyebab kehancuran suatu negara. “Kutukan sumber daya alam” ini dapat terjadi melalui tiga jalan/saluran²⁵, dan saluran pertama adalah disrupsi terhadap struktur ekonomi. Saluran ini menjelaskan bagaimana banyaknya ekspor komoditas primer menyebabkan mata uang terapresiasi, hal ini mengurangi daya saing ekspor dan impor menjadi murah. Selain itu, aktivitas ekonomi yang berfokus pada ekstraksi sumber daya alam akan mengurangi insentif pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi yang inovatif. Saluran kedua adalah tentang kegagalan institusional; pemerintah yang tidak efisien dalam mengolah sumber daya alam, dan tidak dapat menyalurkan manfaat sumber daya alam untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan indikator sosial lainnya. Saluran ketiga adalah konflik yang dapat terjadi akibat ketidakpuasan dari kelompok tertentu yang memiliki ikatan sejarah dengan tempat adanya sumber daya tersebut serta konflik akibat perebutan sumber daya oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan²⁶.

Dalam jangka panjang, sumber daya alam Indonesia khususnya yang tidak dapat diperbaharui akan semakin berkurang/hilang. Cadangan minyak mungkin hanya akan bertahan selama sepuluh hingga 15 tahun lagi, sedangkan cadangan batu bara diperkirakan habis dalam 20 tahun. Tapi situasi ini bukan tidak mungkin untuk diubah. Pemerintah daerah yang diberkahi dengan pendapatan tinggi dari sumber daya alam, terutama minyak dan gas, harus mampu mendidik masyarakatnya, memperkerjakan orang-orang terbaik untuk membantu mendiversifikasi ekonominya dan memperkuat layanan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga dapat menawarkan bantuan dengan berbagi pengetahuan dan praktik pengelolaan sumber daya alam untuk menjauhi kutukan sumber daya alam.

²⁵ Tadjoeeddin, Z., (2007). A future resource curse in Indonesia: The political economy of natural resources, conflict and development. CRISE Working Paper Number 35, University of Oxford.

²⁶ Beberapa negara telah berhasil keluar dari kutukan atau setidaknya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kutukan tersebut. Dubai adalah contoh negara yang berhasil mengimplementasikan visi jangka panjang sebelum kehabisan minyak. Dubai menginvestasikan kekayaan sumber daya alamnya kepada masyarakatnya dan mendiversifikasi ekonominya. Kebijakan ini dikenal sebagai 'Dana Sumber Daya Alam/Natural Resources Funds' (NRF). Dana dari kebijakan NRF selanjutnya dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran, untuk investasi

3.2. Budaya Nusantara (*Social Capital*)

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun bahasa yang dapat ditemui di berbagai daerah di dalam negara ini. Semboyan nasional yang tertulis pada lambang negara, Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu), mencerminkan kondisi keberagaman budaya di Indonesia. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Semboyan ini didukung oleh ungkapan untuk budaya saling membantu yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu gotong royong.

Dalam sejarahnya, kepulauan Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perdagangan dunia semenjak abad ke-7. Posisi strategis Indonesia dalam perdagangan dimulai semenjak berdirinya kerajaan Sriwijaya yang menjalin hubungan perdagangan dengan Cina, India, dan Arab. Beragamnya kelompok etnis dan agama di Indonesia menyebabkan perkembangan budaya kreatif yang sangat bervariasi mulai dari pertunjukan, busana, olahraga, arsitektur, seni musik, sastra, makanan, dan perfilman. Keberagaman budaya dan pengalaman Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia ini dapat menjadi potensi besar bagi Indonesia pada saat ini untuk mengembangkan perekonomian daerah terutama melalui sektor pariwisata. Perkembangan pesat agama Islam serta budaya syariah di Indonesia juga merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan luas wilayah perairan sebesar 3,2 juta km², masyarakat Indonesia memiliki budaya maritim yang tinggi. Teknologi perkapalan dan pelayaran telah berkembang pesat pada masa kerajaan hindu-budha di Indonesia.

Tradisi/budaya kita yang ada sudah sejak lama adalah bergotong royong, dimana warga pada suatu komunitas bersama-sama membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi salah satu/beberapa warganya. Sebagai contoh, gotong royong membangun rumah peribadatan. Secara teoretis, hal ini disebut sebagai modal sosial. Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial ini sebagai suatu kerja sama informal yang didasari oleh berbagai nilai-nilai (*values*) dan norma (*norms*) dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan semangat kegotongroyongan atau budaya saling menolong, tentu mempunyai dampak yang sangat positif terutama dengan menciptakan ketahanan yang kuat bagi suatu komunitas. Selanjutnya, Putnam (1993) menyatakan bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan komponen esensial dari modal sosial. Kepercayaan sebagai motivasi dasar untuk bekerja sama. Semakin tinggi tingkat kepercayaan dalam suatu komunitas maka semakin tinggi kecenderungan mereka untuk mau bekerja sama, dan pada gilirannya kerja sama tersebut membuahakan kepercayaan yang lebih besar lagi.

Untuk konteks perekonomian Indonesia, Juhro et al, (2020b) menunjukkan peran penting modal sosial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia. Bangsa Indonesia kaya akan nilai-nilai budaya seperti gotong royong yang dapat memberikan dampak yang positif terhadap *social capital* seperti integritas dan kejujuran. Terkait dengan hal ini, nilai-nilai keagamaan (religiousitas) juga menjadi faktor penting yang secara signifikan memberikan dampak pada pertumbuhan produktivitas. Temuan tersebut memiliki beberapa implikasi diperlukannya upaya untuk melestarikan dan membudayakan kembali budaya bangsa dan nilai-

nilai kebangsaan luhur yang bernilai positif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Demikian pula halnya dengan upaya untuk meningkatkan tingkat religiositas masyarakat Indonesia ditengah keberagaman yang ada.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Azis (2019) bahwa dalam hubungan antara budaya dan ekonomi, terdapat komponen yang memainkan peran sebagai variabel penghubung. Variabel penghubung yang memiliki peran penting dalam menghubungkan (kausalitas) ekonomi dan budaya adalah institusi/lembaga, baik formal maupun informal. Lembaga informal berasal dari “*socially transmitted information*” dan merupakan bagian dari warisan/budaya, sementara lembaga formal umumnya berkaitan dengan sistem politik yang berlaku. Keduanya memengaruhi kinerja perekonomian dengan cara yang berbeda, meskipun hasil akhir yang tercipta dari keduanya sama yaitu efisiensi kinerja perekonomian. Lembaga/institusi yang dipengaruhi budaya dapat memengaruhi *transaction cost* (seperti biaya negosiasi dan informasi asimetris) yang pada gilirannya akan memengaruhi perekonomian. Dalam lingkungan yang dinamis, melalui keputusan organisasi tentang teknologi dan inovasi, serangkaian persyaratan yang mencerminkan kualitas lembaga dan *social capital* memiliki peran penting dalam memengaruhi pertumbuhan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Budaya dan lembaga berinteraksi dan berkembang secara saling melengkapi (komplementer), bukan hubungan kausalitas satu arah. Tipe suatu lembaga akan membuat budaya berkembang ke arah yang berbeda, sementara budaya yang berbeda juga akan membuat lembaga berfungsi secara berbeda.

3.3. Populasi dan Bonus Demografi

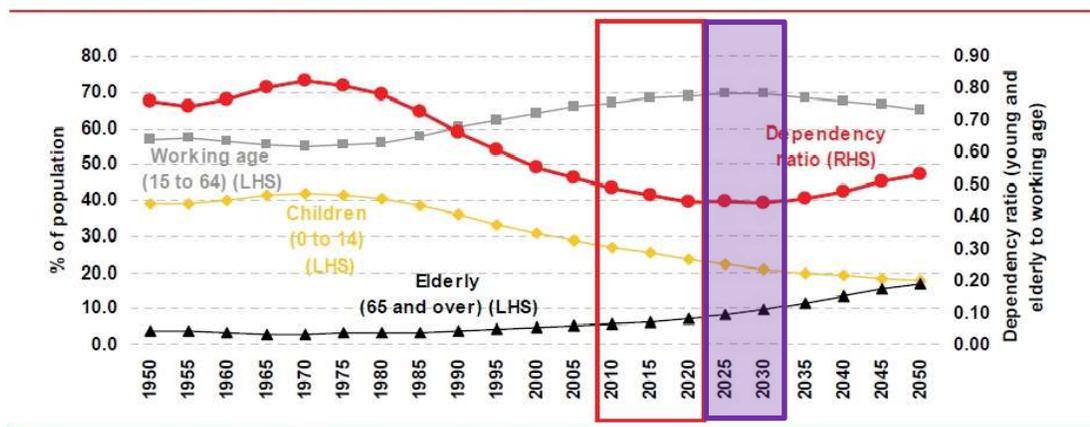
Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa, banyaknya penduduk Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat besar, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Selama 15 tahun terakhir ini, Indonesia juga mengalami pertumbuhan kelas menengah dari 7 % menjadi 20 % dari populasi, yang berarti sebanyak 52 juta orang Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok menengah. Tingkat urbanisasi di Indonesia juga tumbuh dalam tingkat yang tinggi. Sekitar 55 % penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dengan peningkatan konstan sekitar 2,5 %, diperkirakan jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan akan mencapai sekitar 70 % dari total populasi dalam 10 tahun ke depan. Jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2020 berada di angka 137,91 juta orang. Namun demikian, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja di Indonesia, paling tidak dari kualifikasi lulusan pendidikannya.²⁷

Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir pada 2030. Bonus demografi adalah peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat tingginya

²⁷ Dari jumlah angkatan kerja itu, baru sekitar 25 % angkatan kkerja di Indonesia yang memiliki pendidikan setingkat SMA ke atas. Angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi lulusan SMP ke bawah ini akan membuat Indonesia sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin global. 53 % dari pekerja di industri manufaktur hanya memiliki pendidikan setingkat SMP ke bawah, dominasi ini akan menyulitkan revolusi industri yang akan banyak berkaitan dengan ekonomi digital dan teknologi robotik.

proporsi penduduk usia produktif dibandingkan dengan usia non-produktif. Di Indonesia, fenomena ini terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu yang dipercepat dengan keberhasilan dalam menurunkan angka kelahiran, meningkatkan kesehatan, dan program pembangunan. Bonus demografi memberikan ketersediaan tenaga kerja yang banyak dan pada saat yang sama dukungan ekonomi yang harus diberikan penduduk usia produktif kepada penduduk usia non produktif menjadi lebih ringan. Akibatnya penduduk usia produktif memiliki peluang untuk menabung yang pada akhirnya meningkatkan sumber pembiayaan investasi. Bonus demografi merupakan modal dasar untuk lolos dari *middle income trap*, khususnya melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik. Indonesia sudah mulai mendapatkan bonus demografi mulai tahun 2010 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 hingga 2030.

Gambar 2. Skema Bonus Demografi Indonesia



Sumber: Bank Indonesia (2017)

Proyeksi penduduk produktif Indonesia (usia 15 sampai 64 tahun) pada tahun 2020 adalah 185,3 juta jiwa dan milenial (usia 21- 36 tahun) berkontribusi pada sekitar 63,5 juta jiwa. Ini menjadikan milenial sebagai mesin pertumbuhan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Generasi milenial berinovasi melalui aktivitas kreatif, pekerjaan pengetahuan, dan pembuatan *start-up* yang didukung oleh inkubator bisnis atau akselerator yang didorong oleh modal ventura. Inovasi ini didukung oleh kecerdasan generasi milenial untuk menggabungkan berbagai sumber daya yang mereka miliki untuk membuka jalan menuju berbagai peluang. Perkembangan teknologi merupakan bagian inti dari kehidupan mereka. Tren populer global sangat mempengaruhi mereka yang memiliki akses ke teknologi seperti *smartphone*, internet, dan media sosial. Ketika teknologi tersebut didukung oleh pendidikan yang tepat, hal ini dapat mendorong pandangan yang lebih luas tentang dunia dan dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif dan merekonstruksi praktik ekonomi agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki generasi milenial, potensi Indonesia dalam kompetisi global di berbagai bidang akan semakin baik apabila generasi milenial dapat dikembangkan secara optimal.

Terlepas dari peluang yang tersedia bagi generasi milenial untuk memulai kegiatan ekonomi kreatif, generasi milenial tampaknya masih menghadapi hambatan dan ancaman yang

dapat menghalangi manfaat dari kelebihan mereka. Walaupun generasi milenial di berbagai wilayah memiliki gagasan dan antusiasme yang sama tentang teknologi dan kreativitas baru, akses menuju teknologi masih belum tersebar secara merata. Kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan juga ini juga menyebabkan hambatan lain seperti pendidikan kewirausahaan yang tidak memadai, kurangnya pengalaman kerja, kurangnya akses ke pinjaman dan kredit, dan kurangnya jaringan. Hambatan Pasar juga dapat mempengaruhi kewirausahaan generasi milenial. Eksternalitas negatif dari globalisasi seperti terkikisnya nilai-nilai budaya lokal perlu diperhatikan agar efek negatif globalisasi tidak menjadi faktor penghambat yang substansial bagi perkembangan generasi milenial. Mendorong generasi milenial Indonesia untuk berkontribusi pada ekonomi terutama melalui kegiatan kreatif akan membutuhkan investasi pada potensi mereka dan pencegahan ancaman negatif agar mereka dapat menjadi pemimpin di dunia global maupun domestik.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan bahan baku impor, dan menciptakan tambahan lapangan kerja, dibutuhkan kewirausahaan yang bersifat inklusif. Dengan modal perkembangan teknologi yang pesat, generasi milenial memiliki potensi untuk menjadi pelaku utama dalam membangun kewirausahaan sosial. Dengan menjadi wirausaha yang berbasis sumber daya alam unggulan Indonesia terutama di sektor pertanian, generasi milenial dapat memanfaatkan kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi untuk mengakses pasar dan meningkatkan efisiensi produksi pertanian. Sektor pertanian saat ini mengalami masalah yaitu kurangnya minat generasi muda yang mau bekerja di sektor pertanian. Regenerasi di bidang pertanian akan membuat lapangan kerja di sektor pertanian menjadi menarik bagi generasi baru, prospektif dan menguntungkan, serta dapat menurunkan angka pengangguran. Dengan akses pasar yang kuat dan proses produksi serta distribusi yang memanfaatkan kemajuan teknologi, kewirausahaan di sektor pertanian dengan generasi milenial sebagai penggerak utamanya dapat memenuhi kebutuhan pangan yang tinggi di daerah perkotaan serta meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah pedesaan.

3.4. Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah

Dalam dua dekade terakhir, Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat baik secara global maupun nasional. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sebesar sekitar 229 juta jiwa pada tahun 2020. Jumlah penduduk muslim akan terus meningkat dan diperkirakan mencapai 27.5% dari total populasi dunia pada 2030. Peningkatan penduduk muslim ini akan menyebabkan permintaan terhadap produk dan jasa halal bertambah secara signifikan.

Namun demikian, peran Indonesia dalam memenuhi permintaan produk dan jasa halal belum optimal. Indonesia baru memiliki kontribusi di pasar halal dunia sebesar 3,8% dari 2,1 triliun dolar Amerika. Indonesia menempati posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia dalam the Global Islamic Economy Index 2018/2019. Performa ekspor Indonesia dalam memenuhi kebutuhan produk fesyen muslim, pariwisata halal, dan makanan halal terus meningkat, namun

Indonesia masih memiliki net impor yang besar untuk produk dan jasa halal sehingga menyebabkan defisit pada transaksi berjalan. Saat ini industri halal Indonesia menghasilkan 53,2 triliun rupiah per tahun, setara dengan 0,4 % PDB Indonesia.

Tentunya masih terdapat berbagai tantangan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Regulasi terkait industri halal yang belum memadai, kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat akan produk halal, dan juga keterhubungan antara industri halal dan keuangan syariah yang masih rendah merupakan beberapa masalah utama dari pengembangan ekonomi syariah. Masalah lainnya adalah kurangnya kapasitas produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi produk halal di Indonesia. Tata kelola dan manajemen risiko sektor halal masih belum memadai. Pemanfaatan teknologi belum optimal pada industri halal. Standar halal Indonesia belum dapat diterima di tingkat global.

Industri halal adalah potensi ekonomi yang belum dimaksimalkan oleh Indonesia. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekonomi syariah. Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah khususnya sektor industri halal, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dan institusi terkait berpegang pada prinsip 4 C, yaitu komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait (*commitment*), program yang konkrit sehingga mudah untuk diimplementasikan (*concrete*), sinergitas antara lembaga dan pihak terkait (*collaborative*) serta edukasi yang dilakukan secara intens mengenai nilai lebih dari gaya hidup halal (*campaign*).

Sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem rantai nilai halal tersebut, BI telah melaksanakan berbagai program pengembangan ekonomi syariah di sektor pertanian, makanan, fesyen, pariwisata, dan energi terbarukan. Selain itu, MUI dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) berperan sebagai lembaga otoritas sertifikasi halal. UUD No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib bersertifikat halal mulai tahun 2019. Namun demikian, Indonesia sampai saat ini belum terdaftar sebagai anggota SMIIC (*The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries*). Ini adalah lembaga standardisasi proses halal yang menaungi negara-negara Muslim. Hal ini bisa menjadi kendala dalam memasarkan produk berlabel halal Indonesia ke negara-negara Muslim yang lain.

Beberapa tantangan ekonomi syariah Indonesia saat ini adalah: (1) posisi Indonesia saat ini yang belum menjadi pemain besar di sebagian besar industri halal global. Sebagian besar konsumsi produk yang sesuai syariah di Indonesia masih dipasok melalui impor; (2) perbedaan mazhab dan ushul fiqh ulama komisi fatwa dapat mempengaruhi halal atau tidaknya suatu produk, contohnya terdapat perbedaan pendapat mazhab syafi'i dan mazhab maliki mengenai kehalalan binatang yang hidup di dua alam seperti kodok.²⁸ Hal ini menyebabkan pembuatan standar halal internasional bahkan nasional menjadi tidak mudah; (3) pengembangan ekonomi syariah Indonesia masih relatif

²⁸ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Memakan-dan-Membudidayakan-Kodok.pdf>

terbatas dibandingkan dengan beberapa negara lain terutama dibandingkan dengan Malaysia yang menempati peringkat pertama di *State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019*.²⁹

Namun demikian, dari sisi empiris sector keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, pasar keuangan, terutama pasar saham syariah, secara ketat mematuhi prinsip-prinsip Islam sehingga beroperasi secara berbeda dari pasar saham tradisional (Kuran, 1995). Secara khusus, kegiatan di pasar saham syariah terdiri dari lima prinsip, yaitu pelarangan terhadap ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), pelarangan bunga (*riba*), larangan investasi di industri yang 'tidak etis' (*haram*), larangan melakukan spekulasi risiko (*maysir*), dan adanya *risk-return sharing* (Hearn, Piesse, dan Strange, 2011; Abbas dan Trichilli 2015). Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, dengan 227 juta dari 261 penduduknya menganut agama Islam pada 2017. Berdasarkan hal ini saja, aktivitas di pasar modal dan pembangunan ekonomi (pertumbuhan) seharusnya sebagian besar didorong oleh prinsip Islam. Juhro et al. (2020a) dengan menggunakan data *time series* dalam 5 dekade terakhir, menunjukkan bahwa meski diperoleh hasil yang belum *clear-cut*, model semi-endogen secara empiris dapat menjelaskan pertumbuhan Indonesia dengan lebih baik. Ketika model pertumbuhan diperluas dengan memasukan sistem keuangan Islam, hasil yang diperoleh sesuai dengan ekspektasi/hipotesis yaitu pertumbuhan pasar saham syariah dapat memacu pertumbuhan produktivitas (*Total Factor Productivity*) Indonesia.

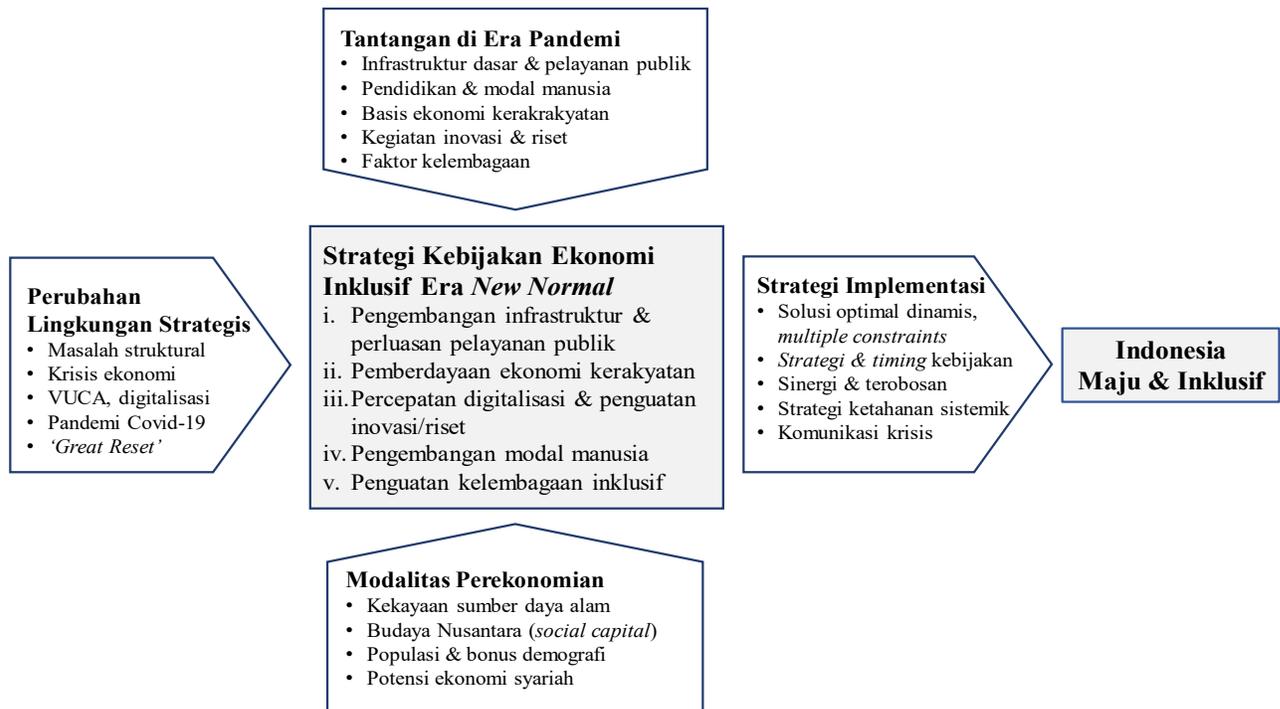
IV. STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI INKLUSIF DI ERA *NEW NORMAL*

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, kondisi pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan, namun juga telah berdampak terhadap perlambatan perekonomian pada sisi *supply* dan *demand* secara paralel dan saling memperkuat satu sama lain (*amplification mechanism*). Respons kebijakan pemerintah terutama penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) turut menambah terjadinya pelemahan permintaan konsumsi masyarakat yang sebetulnya merupakan penopang perekonomian nasional, di saat aktivitas perdagangan luar negeri maupun investasi relatif sudah mengalami penghentian. Guncangan (*shocks*) yang tiba-tiba dan tak terduga ini tentu pada gilirannya akan berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Bagian berikut ini menengahkan rumusan paradigma pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam mengawal era kenormalan baru.

²⁹ Malaysia dapat menjadi negara dengan ekonomi syariah terdepan karena Malaysia telah lama mengambil langkah-langkah penting untuk membangun ekosistem ekonomi Islam terdepan di dunia. Malaysia memiliki standar halal yang kuat dan komprehensif yang didukung oleh ekosistem yang luas yang mencakup zona bebas halal (*halal hubs*), produsen produk halal yang berkembang dengan baik, industri keuangan Islam yang kuat, dan ekosistem investor yang kuat yang mencakup ekuitas swasta, modal ventura, dan *sovereign wealth fund*. Keunggulan Malaysia ini terus dipertahankan dengan mengambil langkah-langkah penting untuk memperkuat perannya dalam regulasi global produk halal melalui pembentukan Badan Akreditasi Halal Internasional yang berupaya untuk menjawab permasalahan di antara para pemberi sertifikasi.

Dengan memperhatikan berbagai perubahan lingkungan strategis dan modalitas perekonomian nasional, berikut ini akan dibahas sejumlah prioritas strategi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan *stakeholders* terkait, khususnya dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional di era pandemi dan *new normal*.

Gambar 3. Lingkungan Strategis dan Strategi Kebijakan Ekonomi Inklusif



(i) Pengembangan Infrastruktur dan Perluasan Pelayanan Publik

Dalam kondisi normal, atau sebelum terjadinya pandemi Pemerintah RI telah menetapkan 42 proyek prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Proyek prioritas strategis tersebut merupakan proyek terintegrasi, baik dari kementerian/lembaga (K/L), maupun integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat. Proyek prioritas ini diharapkan memiliki daya ungkit (*multipliers*) yang tinggi. Proyek prioritas strategis dimaksud antara lain delapan destinasi pariwisata unggulan.³⁰ Juga, komitmen untuk lanjutan program pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, kereta api kecepatan tinggi, serta jaringan pelabuhan utama terpadu. Namun, dengan terjadinya pandemi Covid-19, dilakukan pemangkasan anggaran beberapa kementerian karena fokus pemerintah pada pemulihan ekonomi nasional (PEN).³¹ Dengan semakin terbatasnya anggaran yang tersedia tersebut, strategi kebijakan pembangunan infrastruktur sewajarnya akan difokuskan (*refocussing*) pada jenis infrastruktur yang berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, proyek

³⁰ Proyek dimaksud adalah Danau Toba, Borobudur DSKT, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, dan Revitalisasi Bali.

³¹ Sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-covid-19-anggaran-kementerian-pupr-dipangkas-rp-4458-triliun>

padat karya akan sangat membantu untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak akibat pandemi ini. Namun demikian, para pelaksana pembangunan tetap harus mengimplementasikan protokol kesehatan (standar), sehingga proyek pembangunan infrastruktur dimaksud tidak menjadi sumber/klaster baru penyebaran Covid.

Adapun infrastruktur kritikal yang perlu disiapkan/dilanjutkan di era pandemi saat ini hingga paska pandemi (periode *recovery*) adalah sebagai berikut.

- a. Pengadaan/pengembangan vaksin sebagai *game changer*, baik secara mandiri maupun kerjasama internasional menjadi syarat utama penanganan kesehatan dan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Proses pembuatan vaksin seyogyanya dilakukan dengan cepat, namun tetap memperhatikan aspek keamanan dan keampuhannya. Selain didistribusikan pada kelompok yang ditargetkan (tenaga kesehatan dll), vaksin juga harus dapat diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat luas yang memerlukan.
- b. Pengembangan sarana-prasarana di bidang kesehatan, khususnya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, dan puskesmas. Peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan bagi penanganan Covid-19 sangat diperlukan agar keterisian tempat tidur rumah sakit tidak sampai pada ambang kritis. Penyediaan laboratorium untuk deteksi *polymerase chain reaction* (PCR) dan pengembangan vaksin Covid-19 diperlukan untuk meningkatkan kapasitas tes masal dan persiapan penyediaan vaksin Covid-19. Sebagai dukungan terhadap infrastruktur non-fisik kesehatan yaitu sumber daya manusia kesehatan, insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah serta belanja alat kesehatan (APD, *test kit*, reagen, dll.) juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan SDM kesehatan dan melindungi SDM kesehatan dari risiko saat menangani pasien Covid-19.
- c. Infrastruktur ketahanan pangan. Di era pandemi ini dan ke depan, proyek-proyek strategis untuk penyediaan suplai pangan domestik sangat perlu diprioritaskan mengingat jumlah populasi yang besar, sementara impor dari negara lain sulit dilakukan dalam kondisi krisis seperti saat ini. Proyek dimaksud terutama dalam bentuk pembangunan/perbaikan sarana irigasi, bendungan dan termasuk program cetak sawah baru. Sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim dan perikanan yang sangat besar, infrastruktur pendukung untuk penyediaan pangan juga masih perlu terus dikembangkan dan termasuk melibatkan investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
- d. Infrastruktur telekomunikasi tentu sangat diperlukan dalam kondisi pandemi saat ini. Dengan adanya pembatasan jarak (*social distancing*), cara bekerja karyawan/pegawai mengalami perubahan dari bekerja di kantor menjadi *work from home* dan hal yang sama juga terjadi di sektor pendidikan, siswa terpaksa bersekolah (belajar) jarak jauh (pembelajaran jarak jauh/PJJ), dengan berbasis pada platform digital. Mengingat kondisi geografis nusantara yang luas dan kepulauan, sementara penduduk cenderung teraglomerasi di daerah perkotaan khususnya di Pulau Jawa, maka pembangunan konektivitas infrastruktur digital perlu terus diupayakan (dikelola) secara strategis hingga dapat melayani sampai ke daerah-daerah pelosok (terluar). Kondisi terbatasnya akses digital bagi pelajar di pedesaan (daerah tertinggal) sangat

- perlu mendapat dukungan prioritas oleh pemerintah untuk penyediaan internet gratis (bersubsidi) sehingga kegiatan belajar dapat terus berlangsung, meski dilakukan secara *online*.
- e. Infrastruktur fisik, seperti pembangunan konstruksi untuk jalan tol untuk terus dilanjutkan di era new normal, karena sebagai akses untuk transportasi pangan, obat-obatan dan barang vital lainnya.³² Selain itu, pembangunan jembatan dan berikut moda transportasi darat-laut-udara sangat urgen disiapkan mengingat (dengan asumsi) vaksin Covid akan tersedia di tahun 2021, namun dengan geografis negara kita kepulauan, tentu interkoneksi antar daerah dan antar pulau untuk distribusi dan logistik vaksin tersebut perlu dipastikan sudah tersedia dengan baik hingga mencapai ke pelosok nusantara.³³
 - f. Infrastruktur di bidang energi seperti listrik dan gas, bukan hanya untuk mendukung kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri kesehatan dan industri strategis lainnya yang masih tetap beroperasi dalam kondisi Protokol Covid.
 - g. Selain itu, infrastruktur yang mendukung pola hidup bersih dan sehat seperti instalasi penyediaan air bersih dan termasuk perumahan yang layak juga sangat diperlukan untuk mendukung upaya mengatasi (mencegah) potensi penyebaran virus di masyarakat yang lebih luas. Termasuk dalam konteks ini adalah infrastruktur di sektor keuangan khususnya pembayaran dengan non tunai (*cashless*) untuk transaksi juga perlu terus dikembangkan dan diperluas jangkauannya hingga seantero negeri.

Selanjutnya belajar dari pengalaman pandemi saat ini, dipandang sangat krusial untuk melakukan perbaikan menyeluruh (reformasi) terhadap sistem kesehatan nasional, dan sekaligus antisipatif terhadap kemungkinan risiko sistemik yang berulang di masa depan, sebagaimana yang disampaikan oleh Chief World Health Organization (WHO): “*the world must be better prepared for the next pandemic*”.³⁴ Untuk itu, paling sedikit ada 2 poin penting yang dapat menjadi prioritas kebijakan (*soft infrastructure*) di bidang kesehatan nasional.

Pertama, sangat diperlukannya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI no.28/2014.³⁵ Di era pandemi saat ini, pelaksanaan JKN dimaksud merupakan upaya perlindungan sosial diperlukan sebagai respons terhadap dampak Covid-19 kepada masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Dalam konteks ekonomi, hal ini juga berarti untuk menjaga kemampuan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen kunci bagi perekonomian

³² <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/06193371/jokowi-kebut-infrastruktur-di-tengah-pandemi-terkendal-a-dana-hingga-lahan?page=all>

³³ <https://www.wsj.com/articles/covid-19-vaccine-race-turns-deep-freezers-into-a-hot-commodity-11599217201>

³⁴ Sumber: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who/world-must-be-better-prepared-for-next-pandemic-says-who-boss-idUSKBN25Y1IY>

³⁵ Untuk lebih detail lihat, <https://www.persi.or.id/images/regulasi/permenkes/pmk282014.pdf>

nasional. Semakin banyaknya pengguna JKN akan meningkatkan pengumpulan pendapatan dan pengumpulan risiko yang merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan asuransi sosial.³⁶

Kedua, di era digital saat ini, pengembangan/pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis digital seperti: *Artificial Intelligence* (AI), sangat urgen dikembangkan, khususnya dengan mempertimbangkan risiko sistemik khususnya penularan penyakit antar manusia (antar hewan dan manusia) dan berbagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia dapat terjadi dalam jangka waktu yang sangat cepat dan tak terduga. Aplikasi teknologi berbasis mesin/algorithm ini diyakini akan sangat membantu dan lebih efisien untuk mendiagnosis dan mengatasi potensi permasalahan yang terkait dengan kesehatan manusia.³⁷ AI juga akan bermanfaat menganalisis data besar dan mikro untuk membuat sistem peringatan dini terhadap risiko pandemi ke depan, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang *vulnerable* terhadap risiko guncangan, serta dapat membantu dalam percepatan penemuan riset terhadap vaksin Covid-19.

(ii) **Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

Perberdayaan ekonomi kerakyatan akan berfokus pada sektor UMKM, mengingat potensi yang besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan dalam penyerapan tenaga kerja. Saat ini UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Untuk itu, pilar strategi pengembangan ekonomi diarahkan untuk penyelamatan (relief) UMKM dalam jangka pendek dan penguatan/pengembangan UMKM yang kompetitif secara global dalam jangka menengah-panjang.

Membangun UMKM yang kompetitif

Untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan kompetitif, tentu sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia (pelaku) UMKM yang kompeten dan profesional. Kriteria pelaku UMKM dimaksud, yaitu memiliki *entrepreneurship skill*, manajemen produksi-pemasaran-keuangan, dan cakap (pengetahuan dasar) dalam pemanfaatan teknologi digital khususnya.

Untuk itu, meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM, Pemerintah telah menyusun sejumlah program kebijakan khususnya berupa pemberian pelatihan bagi pelaku UMKM yang diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam rangka peningkatan produktivitas dan penjualan (skala ekonomi), dengan subjek antara lain: pengetahuan manajerial, dan khususnya pemanfaatan teknologi terkini di era digitalisasi saat ini. Salah satu program pelatihan yang relevan untuk menggugah *awareness* pelaku UMKM terhadap manfaat peranan teknologi digital untuk

³⁶ Anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2020 adalah 203,9 triliun rupiah yang akan disalurkan melalui program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial tunai dan sembako, dll. JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan harus dapat menjaring lebih banyak pengguna dan bahkan mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan JKN. Saat ini biaya perawatan Covid-19 dapat ditanggung melalui BPJS kesehatan. Maka dari itu, penjangkaran pengguna JKN yang lebih besar akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama Covid-19 saat ini dan pelayanan kesehatan lainnya di masa depan.

³⁷ Sejumlah negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Australia relatif berhasil dalam pengendalian penyebaran Covid (a.l. melalui *contact tracing* dan *forecasting contagious effects*) dengan penggunaan aplikasi teknologi digital.

komersialisasi dan *outreach* penjualan UMKM tanpa batas geografis, antara lain yang diselenggarakan oleh Baparekraf (Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dengan Digital Entrepreneurship (BDE 2.0).³⁸

Selain itu, Pemerintah juga sedang mengajak pelaku industri, UMKM, dan pendidikan tinggi terutama vokasi untuk bersinergi memanfaatkan momentum pengembangan kawasan industri.³⁹ Strategi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pihak industri/UMKM maupun pihak pendidikan vokasi. Dengan adanya sinergi antara UMKM dan pendidikan vokasi, akses mahasiswa untuk melakukan magang sebagai sarana belajar sambil bekerja akan meningkat sehingga lulusan vokasi nantinya telah terbekali gambaran dalam melakukan pekerjaan secara nyata. Di sisi lain, pendidikan vokasi dapat memberikan bantuan dan pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam menjalankan usahanya. Sinergi ini akan menciptakan lulusan vokasi yang memiliki kapabilitas untuk bekerja di industri/UMKM dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia UMKM yang telah ada.

Strategi lain dalam konteks pengembangan SDM UMKM pasca pandemi dapat dilakukan melalui pendampingan dan termasuk pelatihan UMKM dalam penggunaan platform *online*, meningkatkan kreativitas dan inovasi serta strategi pemasaran *online*. Pendampingan dan pelatihan dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi, *marketplace provider*, dan perbankan. Khusus untuk mendukung penjualan ekspor produk UMKM diperlukan pendampingan bersama agregator dan memanfaatkan informasi pasar luar negeri dari Kementerian Luar Negeri terkait standardisasi dan kurasi produk agar dapat memenuhi kriteria dan *demand* di pasar luar negeri. Fasilitasi pemerintah diperlukan pula juga dalam hal pendampingan dan pelatihan kepada usaha mikro agar tumbuh menjadi wirausaha.⁴⁰

Di era digital ini, UMKM didorong untuk menjadi kekuatan baru perekonomian nasional. Terdapat faktor kunci lain untuk mewujudkan visi ini, selain faktor SDM dari pelaku UMKM sebagaimana dibahas di atas, yaitu, digitalisasi melalui inisiasi UMKM *go digital* dan terintegrasi dengan modal keuangan digital melalui sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Namun demikian, mengingat dampak negatif akibat pandemik yang relatif signifikan terhadap UMKM, untuk itu perlu dilakukan terobosan kebijakan dari sisi pembiayaan khususnya. Dalam rangka mengurangi beban *cashflow* UMKM, pemerintah dan OJK memberikan stimulus

³⁸Sumber: <https://teknologi.bisnis.com/read/20200513/84/1239933/kemenkominfo-tawarkan-beasiswa-pelatihan-digital-bagi-15.200-peserta>

³⁹Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200826194907-4-182263/jokowi-vokasi-kita-dorong-sinergi-dengan-umkm>

⁴⁰ Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kapasitas pendamping yang dapat diterapkan, adalah: (i) Pemberdayaan tenaga pelatih yang telah dimiliki oleh kementerian desa dengan peningkatan pemahaman terhadap proses bisnis; (ii) Mencetak lebih banyak tenaga ahli pendamping yang menguasai beberapa standar keahlian tertentu antara lain manajemen produksi, manajemen keuangan dan manajemen risiko; (iii) Pemberdayaan tenaga PKK yang sudah tersedia di setiap desa dengan melengkapi kapasitas mereka tentang teknologi digital; (iv) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dapat dilakukan dengan lembaga pengabdian masyarakat atau dengan mahasiswa KKN untuk pendampingan untuk aspek spesifik tertentu misalnya pelatihan kewirausahaan.

berupa restrukturisasi kredit yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 Tahun 2020. Beberapa cara restrukturisasi kredit tersebut adalah penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.⁴¹ Kebijakan restrukturisasi kredit ini diharapkan dapat membantu keberlanjutan usaha pelaku UMKM sehingga mampu bertahan dalam menghadapi kondisi pandemi yang penuh ketidakpastian ini. Selain restrukturisasi kredit, belajar dari kebijakan negara lain untuk membantu UMKM *survive* dan segera bangkit di era *new normal*, Pemerintah juga perlu memfasilitasi likuiditas UMKM dengan memberikan pinjaman jangka pendek bersuku bunga subsidi untuk membantu permodalan bagi usaha mikro atau wirausaha yang baru tumbuh, karena sebagian besar merupakan korban PHK dari industri.

Selain itu, upaya penyelamatan terhadap UMKM seharusnya juga tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, namun juga perlu memperhatikan kemampuan (daya saing) UMKM dalam jangka panjang, dan kontribusinya terhadap perekonomian global terutama mengingat ruang kompetisi yang terbuka di era digitalisasi saat ini. Digitalisasi UMKM dapat menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas. Namun demikian, sebagian besar pemain UMKM di pasar *online* saat ini masih didominasi sektor perdagangan, atau kebanyakan masih menjadi *reseller* dari produk impor.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu sangat hati-hati dalam memberikan stimulus untuk penyelamatan UMKM digital jika hanya menjadi perantara produk impor, karena berpotensi memperbesar *current account defisit* (CAD). Visi kita bersama ke depan yaitu menjadikan UMKM nusantara yang lebih berorientasi pada pengembangan sektor manufaktur (melalui inovasi dan adopsi teknologi), serta masuk dalam jaringan pemasaran global (*Global Value Chains / GVC*). Kondisi ini pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan devisa (surplus perdagangan), selain tentunya bersifat inklusif dalam hal penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi ekonomi informal. Untuk meningkatkan ekspor dan mampu menyaingi produk impor, paradigma pengembangan UMKM digital dapat lebih target spesifik, sehingga dapat mendorong pergeseran dari sekedar *reseller* produk impor menjadi pemasok atau bahkan produsen dari produk domestik yang berorientasi pada ekspor. Untuk itu, UMKM perlu dapat menciptakan produk yang konsisten secara kualitas dan kuantitas sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM domestik dapat terbangun. Selanjutnya, kesadaran UMKM akan prosedur ekspor seperti prosedur bea cukai juga perlu dibangun agar UMKM dapat melakukan ekspor tanpa hambatan regulasi yang dapat menggagalkan proses transaksi. Kerja sama perdagangan yang telah dilakukan Indonesia juga harus dapat menjangkau lebih banyak UMKM sehingga memperluas koneksi UMKM untuk melakukan ekspor. Yang terakhir, tentunya pemanfaatan teknologi digital berupa *e-commerce* dapat menjadi penghubung antara pelaku usaha domestik dengan pasar global.

⁴¹ Hingga tanggal 10 Agustus 2020, program restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai nilai Rp 837,64 triliun dari 7,18 juta debitur. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Kolaborasi-dan-Sinergi-Pengawasan-Terintegrasi-OJK-Jaga-Sektor-Jasa-Kuangan-Tetap-Stabil.aspx>

Selanjutnya, selain faktor SDM dan digitalisasi UMKM, faktor lain yang berperan strategis bagi UMKM dan “naik kelas” sebagai *global player*, dibutuhkan sinergi yang kuat dan terkoordinasi dari semua pihak baik dari sisi kebijakan (pemerintah pusat dan daerah) maupun swasta (badan usaha). Untuk itu perlu dipetakan skema sinergi dan kewenangan antara Pemerintah, Badan Usaha, pelaku UMKM, akademisi dan agregator dalam pengembangan UMKM agar tidak tumpang tindih. Adapun sinergi antara Pemerintah dan Badan Usaha utamanya dibutuhkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendampingan untuk peningkatan kualitas SDM UMKM, antara lain melalui pelatihan teknologi, manajemen, keuangan, dan pengemasan bersama badan usaha seperti platform *e-commerce* dan agregator.
- b. Pemerintah dapat menugaskan BUMN di setiap daerah untuk menjadi aggregator sebagai penampung sekaligus memberikan nilai tambah produk UMKM sehingga membentuk *value chain* ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan *economics of scale* UMKM. Melalui kemitraan, UMKM dapat melakukan perbaikan standardisasi mutu dan kualitas atas hasil produk dan proses bisnis guna memenuhi standar yang ditetapkan dunia usaha (perusahaan besar) yang menjadi mitra. Untuk mendorong UMKM masuk pasar ekspor, diperlukan pula kemitraan dengan Badan Usaha yang telah memiliki pengalaman pada *global value chain*.
- c. Kerja sama di bidang logistik dapat diterapkan untuk bantuan pengiriman produk UMKM untuk mengatasi kendala distribusi dan subsidi logistik melalui pemberian potongan harga pengiriman untuk produk produk UMKM tujuan ekspor.

Pengembangan UMKM Syariah

Selain UMKM konvensional yang diuraikan di atas, UMKM syariah di nusantara khususnya memiliki peluang untuk berkembang lebih pesat lagi, mengingat mayoritas populasi konsumen adalah Muslim di tanah air, termasuk potensi pasar produk syariah di luar negeri khususnya di kawasan Timur Tengah. Selain aspek SDM dan digitalisasi UMKM seperti pada UMKM konvensional di atas, isu spesifik bagi UMKM syariah yaitu aspek pembiayaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan akses ke perbankan atau lembaga keuangan syariah termasuk sumber pendanaan yang berbasis platform digital, yaitu dikenal dengan *financial technology (fintech)*. Di era digital saat ini, platform keuangan syariah berbasis digital berpotensi besar untuk berjalan bersamaan dengan UMKM baik konvensional maupun syariah. Pendanaan *fintech* syariah tidak hanya berbasis ekuitas atau modal komersial, dana sosial seperti zakat dan wakaf juga berpotensi untuk menjadi sumber pendanaan usaha kecil yang terdampak Covid-19.

Dengan mendorong lebih banyak UMKM syariah untuk mencari pendanaan melalui *fintech* syariah, usaha-usaha yang tadinya tidak dianggap layak untuk mendapat pendanaan oleh bank konvensional akan lebih banyak terjaring oleh *fintech* syariah karena persyaratan yang lebih fleksibel. Pendanaan *fintech* syariah juga memberikan keamanan bagi pengguna Muslim karena penggunaan prinsip syariah dalam perjanjiannya. Skema berbagi risiko (*risk-sharing*) memberikan keamanan finansial lebih terhadap pelaku UMKM karena segala keuntungan dan kerugian yang dialami oleh UMKM tersebut dibagi kepada para mitra pendana sesuai kesepakatan sehingga

pembagian risiko tersebut menjadi adil bagi kedua belah pihak. Saat ini sudah terdapat payung penyelenggara *fintech* syariah yang ditunjuk oleh OJK yaitu Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sehingga setiap *fintech* syariah dapat memiliki wadah untuk melakukan pengembangan.⁴² Momentum ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM-UMKM syariah untuk mencari pendanaan berbasis syariah yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan *recovery* akibat dampak Covid-19 dan juga untuk mengembangkan usahanya dalam menjawab tantangan era digital di masa depan.

(iii) Percepatan Digitalisasi dan Penguatan Inovasi/Riset

Transformasi ekonomi digital berbasis inovasi dan adopsi teknologi digital menjadi semakin urgen untuk menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas tantangan global-domestik saat ini dan sekaligus mengawal optimism bertransisi menuju negara maju yang kompetitif dan inklusif dalam jangka menengah-panjang. Untuk itu, arah pembangunan sangat perlu untuk didorong dengan mempercepat proses digitalisasi dalam segenap aspek serta membangun ekosistem inovasi yang memberdayakan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara teoretis, menurut Lawrence dkk. (2020), ekosistem inovasi adalah jaringan organisasi dan individu dengan aset seperti kreativitas manusia, ketajaman bisnis, penemuan ilmiah, dan modal investasi. Organisasi dan individu ini datang bersama-sama menumbuhkan ide agar bisa tumbuh menjadi pelaku usaha yang kuat dan industri kompetitif yang dapat menciptakan dampak sosial dan ekonomi secara positif.⁴³ Namun demikian, ekosistem inovasi di negara kita khususnya sinergi pemerintah, institusi riset, dan dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya relatif belum berjalan. Padahal dengan adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak yang terlibat, dapat mendorong hilirisasi dan komersialisasi (pemanfaatan) hasil penelitian dan inovasi pada gilirannya.

Dimensi lain dari riset dan inovasi pada konteks Indonesia adalah faktor keragaman tingkat perkembangan baik SDM, dunia usaha dan sektor ekonomi antar daerah. Untuk itu, aplikasi inovasi/hasil riset tidak mungkin berlaku seragam/homogen, sehingga tentunya perlu mengakomodasi “local wisdom” dan faktor spesifik yang bersifat inheren di daerah dimaksud. Sebagai ilustrasi, adopsi mesin traktor untuk menggarap sawah mungkin relevan di Jawa, namun di daerah lain, belum tentu *applicable*, sehingga perlu dibuat teknologi alternatif yang *customized* untuk di daerah tersebut. Dalam hal ini, teknologi yang tepat guna dapat dipandang sebagai *frugal innovation*, yang didefinisikan sebagai sebuah proses desain yang memprioritaskan kebutuhan dan keadaan masyarakat untuk melakukan inovasi produk dan layanan yang mudah beradaptasi, terjangkau, dan mudah diakses. *Frugal innovation* merupakan pilihan yang baik bagi Indonesia, karena berorientasi pada penyediaan teknologi yang terjangkau secara ekonomi. *Frugal innovation*

⁴² <https://finansial.bisnis.com/read/20200824/563/1282420/afsi-resmi-ditunjuk-ojk-sebagai-payung-bagi-penyelenggara-fintech-syariah>

⁴³ Sumber: <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/06/ksi-1591869641.pdf>

mendorong individu untuk mengasah kreativitasnya dan kewirausahaan yang inovatif (Juhro dan Aulia, 2019). Selanjutnya, dalam konteks respons terhadap pandemi Covid-19 dan persiapan menuju era kenormalan baru, Indonesia membutuhkan inovasi (litbang) yang terutama difokuskan untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan sekaligus meminimalkan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini.

Untuk memitigasi risiko dari meningkatnya ketimpangan dan terhambatnya perkembangan generasi masa depan akibat pandemi Covid-19, maka dibutuhkan inovasi kebijakan dalam setiap tahap menuju era selanjutnya.

Bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan

Hasil polling terhadap sejumlah ekonom, mayoritas setuju bahwa langkah optimal saat ini adalah untuk berinvestasi lebih besar untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan melalui pembangunan RS sementara, peningkatan intensitas uji masal, peningkatan produksi ventilator serta alat pelindung diri, dan pemberian insentif untuk tenaga medis.⁴⁴ Akses kesehatan Indonesia saat ini masih cukup terbatas. Untuk dapat mengendalikan pandemi Covid-19 ini, diperlukan akses yang menyeluruh, terutama untuk golongan yang rentan terkena virus Covid-19 ini. Untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan, pemanfaatan teknologi *telemedicine* sebagai akses masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan seperti konsultasi dengan dokter dan pengiriman obat-obatan akan sangat membantu proses berobat masyarakat tanpa perlu datang ke fasilitas kesehatan secara fisik. Pada daerah *hotspot* Covid-19 (seperti Jabodetabek, Jawa Timur, dan Bali), diperlukan inovasi pemanfaatan *mobility information* agar pekerja dapat melakukan pekerjaannya secara *remote*. Beberapa inovasi pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) juga dapat diterapkan seperti penggunaan CCTV untuk mendeteksi pelanggaran *social distancing*, penyederhanaan administrasi rumah sakit menggunakan *chatbot*, dan *software* berbasis AI untuk mendeteksi infeksi Covid-19. Pengembangan berbasis komunitas atau *Community-driven development* (CDD) dapat menjadi ujung tombak pelaksanaan protokol kesehatan dengan basis kelurahan/kecamatan untuk penyebaran informasi kesehatan, *supporting* faskes lokal, penegakan *social distancing*, dan penyediaan kebutuhan primer.

Dalam jangka menengah, diperlukan juga kerja sama investasi termasuk dengan swasta untuk penyaluran layanan kesehatan terutama apabila vaksin sudah dapat diciptakan karena proses penyaluran vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan secara efisien. Dalam jangka panjang, diperlukan perbaikan kondisi dan peningkatan kapasitas infrastruktur kesehatan publik baik yang bersifat fisik maupun nonfisik sebagai persiapan akan kemungkinan adanya pandemi berikutnya di masa depan. Pendekatan *one health system* yang memadukan sistem kesehatan dengan keamanan pangan, kontrol penyakit menular antara manusia dan hewan, serta keselamatan lingkungan juga perlu dilakukan Indonesia sebagai transformasi sistem kesehatan publik untuk jangka panjang. Adopsi *telemedicine* secara luas juga diperlukan

⁴⁴ <https://irsa.or.id/2020/04/02/quick-on-line-survey-result-among-economists-on-policies-to-manage-the-covid-19-crisis/>

dalam jangka panjang agar akses masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa kesehatan dapat semakin meningkat.

Untuk menjaga dan meningkatkan inklusivitas pembangunan, maka dibutuhkan perlindungan sosial bagi kelompok yang paling rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa pondasi perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program Indonesia pintar (PIP), jaminan kesehatan nasional (JKN), kartu sembako, dan kartu pra-kerja. Langkah paling logis tentunya adalah dengan meningkatkan cakupan program-program tersebut untuk menjangkau lebih banyak penerima bantuan karena meningkatnya masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi ini. Pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan dapat menjadi agen percepatan pendataan keluarga penerima yang layak untuk mendapatkan perlindungan sosial tersebut. Diperlukan juga peningkatan nilai bantuan yang diberikan pada jangka pendek ini untuk memitigasi berkurangnya pendapatan dan hilangnya pekerjaan pada kelompok rentan. Pada jangka menengah, skema *cash for work* melalui program-program padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja diperlukan sebagai stimulus masyarakat untuk kembali melakukan kegiatan produktif. Selain itu produksi yang inklusif dalam bentuk pemberian bantuan bagi pekerja informal dan industri mikro, terutama yang bergerak di bidang pangan, serta pelatihan untuk pekerja dan wirausaha juga dapat membantu kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya. Dalam jangka panjang, diperlukan pengembangan inovasi jaringan sosial yang lebih memanfaatkan teknologi digital dan responsif terhadap kejutan negatif. Inovasi di dunia pendidikan yang berfokus pada kemampuan dan keterampilan di dunia kerja juga akan mengurangi potensi jumlah kelompok yang rentan terhadap efek negatif kondisi perekonomian yang mungkin akan terjadi di masa depan.

Di sektor pendidikan, metode pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh seluruh lembaga pendidikan merupakan respons terhadap kondisi pandemi Covid-19. Dengan memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI), layanan pembelajaran berbasis video bisa memberikan *feedback* kepada guru mengenai bagian mana dari suatu kurikulum pembelajaran yang paling sulit untuk dipahami oleh murid.⁴⁵ Dunia usaha yang menggunakan TIK untuk memberikan layanan pendidikan (EdTech) di Indonesia semakin berkembang, dan beberapa diantaranya mulai bersaing secara global. Maka dari itu, pengembangan pendidikan yang mengandalkan teknologi digital melalui pemanfaatan teknologi di sekolah dan universitas serta pengembangan dunia usaha yang bergerak di bidang platform EdTech harus diperkuat agar inovasi pendidikan berbasis digital dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kunci dari penyediaan akses kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, dan berbagai fasilitas dari pemerintah adalah data. Tanpa pendataan yang baik, maka akan sulit bagi pemerintah untuk menentukan target dari setiap program pembangunan. Untuk itu, dipandang sangat perlu untuk mengembangkan sistem identitas penduduk berbasis digital, sebagai langkah inovasi agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan pemerintah dan juga kepentingan pemerintah

⁴⁵ <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/25/how-is-ai-used-in-education-real-world-examples-of-today-and-a-peek-into-the-future/#c64a0b586e8b>

dalam pelaksanaan pembangunan serta berbagai tujuan lainnya (*interoperability*). *Interoperability* ini dapat mencakup layanan finansial digital, layanan jaringan sosial, dan inklusivitas dalam ekonomi digital, sehingga dapat memberi manfaat yang optimal. Dengan adanya identitas digital ini dapat memperlancar sistem pembayaran di perbankan, juga kemudahan pendataan wajib pajak, efisiensi administrasi bisnis maupun pemerintahan, dan kemudahan serta keamanan bagi konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi digital. Akan tetapi, *interoperability* dari identitas digital ini juga mempunyai sejumlah tantangan yaitu dibutuhkannya sistem keamanan digital yang terjamin, sistem persetujuan dalam pembagian data, dan risiko eksklusivitas terhadap masyarakat dengan literasi digital yang rendah dan akses internet yang masih terbatas.

Adopsi teknologi

Aplikasi inovasi yang dapat mengembangkan teknologi tepat guna dan penggunaan sumber daya dalam negeri sebagai substitusi impor sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat bertahan dalam situasi pandemi dan juga keluar dari pandemi sebagai negara yang lebih kuat dari sebelumnya. Adopsi teknologi di sektor andalan yaitu agrikultur/makanan dan manufaktur sehingga sektor tersebut tidak lagi tertinggal dalam penggunaan teknologi dan tidak ketergantungan impor akan membantu banyak pelaku usaha dan tenaga kerja untuk mencapai kesejahteraan. Di sisi lain, sektor-sektor potensial yang dapat berkembang dalam menghadapi pandemi ini seperti kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan pendidikan juga perlu diberdayakan.

Indonesia harus dapat mengidentifikasi cara mengubah sistem agrikultur yang ada sekarang, kebanyakan petani hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar sehingga kebanyakan petani hanyalah pekerja di lahan pertanian tersebut. Hal ini menyebabkan *economies of scale* tidak dapat terjadi dan juga penggunaan peralatan modern jadi terhambat. Infrastruktur distribusi yang masih terbatas menyebabkan banyak hasil tanam yang tidak dapat didistribusikan secara efisien. Salah satu aplikasi teknologi untuk menghadapi hal ini adalah penggunaan *e-commerce* yang secara langsung menghubungkan petani dengan konsumen. Dengan begitu, petani dapat melakukan penanaman dengan lebih aman karena mereka telah mengetahui seberapa banyak permintaan yang akan mereka dapatkan. Penggunaan teknologi pertanian yang dapat membantu produktivitas hasil panen seperti mesin pemilih bibit unggul, alat pemotongan dan pengantongan padi, alat pengering kedelai, dan instalasi pengolahan limbah dapat meningkatkan kapabilitas sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.

Sektor manufaktur juga merupakan salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi Covid-19, banyak pabrik yang mengurangi produksinya karena pekerja harus bekerja sesuai jam kerja yang diatur dalam kondisi pandemi ini. Sektor manufaktur memiliki tantangan dalam memanfaatkan teknologi agar *remote working* tetap memberikan produktivitas yang tinggi. Teknologi *real time monitoring* dapat membantu pabrik dalam mengelola konsumsi energi dan juga melakukan kontrol terhadap peralatan dan mesin. Pemanfaatan teknologi robot untuk melakukan otomatisasi berbagai perakitan produk juga dapat mengoptimalkan produksi. Dengan semakin majunya teknologi internet 5G sehingga akses data menjadi semakin cepat, perkembangan *industrial internet of things* (IIoT) juga menjadi semakin cepat. IIoT dapat

membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan aman bagi pekerja pabrik. Potensi peningkatan efisiensi sektor manufaktur ini dapat menjadi momentum Indonesia untuk mengurangi berbagai ketergantungan impor, terutama barang-barang yang seharusnya bisa diproduksi tanpa harus memiliki kemampuan teknologi yang tinggi.

Kolaborasi riset

Inovasi tentunya tidak terlepas dari tentunya tidak terlepas dari kegiatan pengembangan penelitian/riset dan pengembangan (litbang). Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan gaya hidup dan tatanan ekonomi menuju *less contact economy* yang ditandai dengan adanya *hyperconnectivity* antar manusia melalui teknologi informasi dan komunikasi. Adaptasi kebiasaan baru ini menyebabkan pergeseran pola bisnis, perilaku masyarakat, dan struktur industri. *Hyperconnectivity* menuntut adanya ekosistem digital yang terhubung antar sektor sehingga ketahanan dan efisiensi kegiatan ekonomi dapat meningkat dan Indonesia dapat semakin mendekati revolusi industri 4.0. salah satu inisiatif Kemenristek untuk berkontribusi pada penanganan Covid-19 adalah melalui program konsorsium riset dan inovasi Covid-19 yang merupakan kolaborasi antar lembaga, IDEathon yang merupakan wadah untuk masyarakat untuk berinovasi, Portal SINTA - Covid-19 yang menyediakan deskripsi ilmiah dan data penunjang riset Covid-19, dan Riset-Inovasi Diaspora yang merupakan skema pendanaan riset dan inovasi.

Saat ini terdapat lebih dari 200 program konsorsium riset dan inovasi Covid-19 yang terbagi ke dalam beberapa tema yaitu pencegahan Covid-19, skrining Covid-19, alat kesehatan pendukung, obat-obatan dan terapi, *multi clinic*, dan sosial humaniora. Salah satunya adalah pengembangan vaksin di Indonesia yang diberi nama vaksin “merah-putih” yang menggunakan isolat virus Indonesia. Vaksin merah-putih ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan kerja sama impor, dan terutama menjaga kedaulatan kesehatan manusia Indonesia secara swasembada.⁴⁶

(iv) Pengembangan Moal Manusia

Kondisi pandemi saat ini dapat digunakan sebagai momentum untuk membuat terobosan kebijakan guna perbaikan/peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM secara integratif, efektif dan efisien. Dalam jangka pendek, otoritas pendidikan dapat mengambil sejumlah kebijakan prioritas sebagai berikut. *Pertama*, melakukan relokasi anggaran untuk mendukung konektivitas internet sehingga siswa tetap dapat bersekolah meski melalui interaksi daring (PJJ). Siswa, guru, dan mahasiswa dan dosen masing-masing mendapatkan subsidi pulsa secara reguler. Selain itu, terdapat alokasi untuk tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, dan guru besar. Untuk membantu perekonomian para pengajar⁴⁷.

⁴⁶ <https://www.ristekbrin.go.id/kabar/menristek-kepala-brin-jelaskan-perkembangan-vaksin-merah-putih-dan-tegaskan-mutasi-d614g-tidak-menghambat-pengembangan-vaksin/>

⁴⁷ Sejalan dengan ini, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 mengatur ketentuan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai April 2020 bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan siswa dalam mendukung pembelajaran dari rumah selama masa darurat Covid-19. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan

Selain itu, instansi pemerintah, termasuk BUMN, dan swasta yang menjalankan WFO serta masyarakat yang *high income* juga dapat berperan dengan memberikan bantuan sosial (*social responsibility*) untuk penyediaan internet gratis khususnya bagi siswa-siswa dengan kategori prasejahtera (*low income*) dan orang tuanya yang terkena PHK di lingkungan kantor/area kerjanya masing-masing. *Kedua*, proses penerimaan siswa di tahun ajaran baru yang lalu, pemerintah telah memberikan tambahan kuota untuk penerimaan jumlah siswa kurang mampu di sekolah negeri (tanpa iuran sekolah), meskipun sempat menimbulkan polemik akibat kebijakan yang dilakukan secara insidental. *Ketiga*, dapat dilakukan secara spasial, untuk pembukaan sekolah secara tatap muka khususnya di zona hijau, namun dilakukan secara gradual dan dengan standar protokol Covid.

Selain masalah yang bersifat urgen terkait pembelajaran via daring seperti di atas, permasalahan klasik di pendidikan juga terkait dengan sejumlah faktor, yaitu alokasi anggaran, kualitas guru dan faktor kelembagaan. *Pertama*, kebijakan terkait anggaran pendidikan, meskipun alokasi anggarannya sudah mencapai 20 % dari total belanja negara secara nasional, namun bila dibandingkan dengan *GDP per capita*, rasio belanja pendidikan kita sebesar 3,3 % relatif masih lebih rendah dari Vietnam (6,3%) atau Thailand (4,1%)⁴⁸. Untuk itu, di era *recovery* dan pasca pandemi nantinya, prioritas pertama kebijakan adalah menambah/ meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Meskipun sudah naik 20 %, namun sebetulnya hitungan secara riil per kapita masih sangat rendah, dan ini implikasinya pada daya saing pendidikan nasional yang relatif tertinggal dengan negara *peers* di ASEAN khususnya.⁴⁹

Kedua, dalam rangka peningkatan kualitas guru, strategi kebijakan yang dapat dilakukan terutama adalah (i) rekrutmen untuk tenaga calon guru dilakukan/dipilih berdasarkan kualifikasi yang tepat (*competency-based*), atau bukan karena faktor lainnya. Untuk *existing* guru, perlu dilakukan sertifikasi guru yang standar untuk *update* keilmuan dan wawasannya; (ii) untuk memperoleh guru yang kompetensi tinggi dibutuhkan pula insentif yang menarik bagi calon guru yang baru melamar maupun untuk *existing* guru sehingga punya motivasi tinggi untuk membagikan ilmu ke para siswanya.

Ketiga, sinkronisasi antar kelembagaan juga menjadi faktor kunci untuk perbaikan kualitas pendidikan khususnya di daerah. Kewenangan desentralisasi yang diberikan kepada kepala daerah (walikota/bupati/gubernur) seharusnya dimanfaatkan untuk memilih kandidat pejabat/staf dinas pendidikan yang *capable* dan berintegritas tinggi, atau bukan karena faktor subyektif lainnya. Selain itu, sekolah biasanya memiliki komite sekolah yang bisa memainkan peran penting dalam manajemen sekolah, namun umumnya mereka tidak memiliki otoritas, kapasitas, dan sumber daya untuk dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan manajemen sekolah (perencanaan operasional), turut menyusun dan sekaligus mengawasi penggunaan anggaran yang akuntabel dan

subsidi kuota internet selama empat bulan mulai dari September 2020. <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kemendikbud-berencana-subsidi-kuota-internet-untuk-guru>

⁴⁸ See World Bank (2018)

⁴⁹ https://news.okezone.com/read/2020/08/07/65/2258521/kemendikbud-bakal-berikan-bantuan-kuota-internet-ke-25-mahasiswa?utm_source=dable

efektif seperti dana BOS misalnya. Untuk itu, sangat disarankan keberadaan peran komite sekolah ini lebih dimanfaatkan di masa mendatang.

Kondisi pandemi menyebabkan proses belajar-mengajar konvensional dengan tatap muka menjadi terhambat. Walaupun metode PJJ telah diimplementasikan, masih ada beberapa pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara daring seperti praktikum di lab, pengabdian di desa (KKN), dan magang yang membutuhkan keberadaan fisik secara langsung. Maka dari itu dibutuhkan metode yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembelajaran dan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Konsep perpaduan pembelajaran tatap muka dan daring (*blended learning*) dapat menjadi solusi untuk perguruan tinggi agar tetap dapat menyediakan seluruh tipe pembelajaran bagi mahasiswa. Proses *blended learning* ini juga dapat membantu mahasiswa yang ingin mengambil SKS di luar program studinya/perguruan tingginya.

Permasalahan yang krusial lain terkait pendidikan adalah kurikulum⁵⁰, terutama mengingat kurikulum yang digunakan saat ini cenderung belum mengakomodasi kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini, apalagi kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Hal ini terindikasi dari rendahnya kemampuan membaca murid Indonesia pada hasil PISA.⁵¹ Rendahnya kemampuan lulusan sekolah menengah ini menyebabkan mereka tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan di pasar kerja dan akhirnya cenderung untuk bekerja di pekerjaan dengan upah yang rendah. Secara umum, kurikulum yang digunakan masih bersifat “hafalan”, belum menerapkan *high-order thinking skills* (HOTS) yang lebih berorientasi pada analitis dan pemecahan masalah.

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi (PT) terus meningkat selama 5 tahun terakhir, dan di 2019 tercatat naik menjadi 5,89% dari total angkatan kerja 13 juta orang.⁵² Kondisi ini perlu dicermati secara mendalam, dan salah satu faktor utama penyebabnya adalah minimnya skill yang dimiliki oleh lulusan PT dimaksud. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan baik, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan yang dibutuhkan industri, sehingga universitas dan/ lembaga pendidikan khususnya untuk vokasi/kejuruan dapat menyiapkan tenaga terampil sejak awal (*link and match*). Akreditasi perguruan tinggi juga secara umum relatif masih banyak berada di bawah standar nasional terutama di luar Jawa-Bali, sehingga banyak perguruan tinggi yang kualitas dan relevansinya dengan kebutuhan industri belum tersambung dengan baik.⁵³

Untuk itu, perlu dilakukan sejumlah langkah kebijakan strategis terutama dengan melakukan reformasi kurikulum dan sistem pendidikan nasional yang lebih berorientasi pada

⁵⁰ Lihat World Bank (2018)

⁵¹ Hasil PISA 2018 menunjukkan 70 % murid Indonesia berada pada level 1 kemampuan membaca dan 72 % murid Indonesia berada pada level 1 kemampuan matematika.

⁵²<https://www.kompasiana.com/heryizkak7272/5e27aff4d541df08eb003b42/coba-lihat-fenomena-banyaknya-pengangguran-terdidik-di-tahun-2020?page=all>

⁵³ Meskipun Indonesia telah membuat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pendefinisian pekerjaan dan berbagai tugas yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut (kerangka kompetensi) masih menghadapi kendala, terlebih lagi keterlibatan sektor swasta pada persiapan KKNI juga masih terbatas.

pengembangan SDM yang dapat meningkatkan *skill* berbasis sains, atau yang dikenal dengan STEM (*science, technology, engineering, and mathematics*). Kurikulum ini juga mencakup keterampilan seperti *complex problem solving, creative and critical thinking, social skills*, dan kemauan untuk terus mempelajari hal baru, yang tentunya akan sangat relevan dalam konteks transformasi peradaban baru menuju era digital dan otomasi di masa depan (Deming, 2015). Pengembangan keterampilan berbasis STEM ini akan menjadi sistem pembelajaran seumur hidup modern untuk membantu pekerja beradaptasi dan memperbarui keterampilan mereka selama kariernya. Di era digital saat ini dan akan semakin terus berkembang di masa mendatang, terdapat dua jenis keterampilan yang sangat penting: *pertama*, dengan semakin berkurangnya tugas rutin, *soft skill* seperti kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja dalam tim, memimpin, memecahkan masalah dan mengatur diri sendiri akan semakin dibutuhkan; *kedua*, pentingnya literasi digital semakin meningkat. Keterampilan umum TIK (teknologi informasi dan komunikasi) individu, seperti kemampuan untuk menggunakan alat komunikasi dan pencarian informasi atau *software*, akan semakin dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas *skill* khususnya bagi tamatan perguruan tinggi, Pemerintah (Kemendikbud) telah menetapkan Program Kampus Merdeka, yang pada intinya adalah memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk mendirikan program studi baru, pengajuan akreditasi, perubahan status dari badan layanan umum menjadi badan hukum, serta pemberian hak untuk mengambil mata kuliah di luar program studi untuk mahasiswa dan pendefinisian ulang satuan kredit semester (SKS) sebagai “jam kegiatan”, bukan lagi “jam belajar” sehingga kegiatan seperti magang, pertukaran pelajar, riset, dan lain-lain dapat dihitung sebagai SKS yang diambil oleh mahasiswa.⁵⁴ Dengan demikian, diharapkan nantinya para lulusan kampus tidak hanya menguasai teori, namun juga menguasai *skill yang applicable* sehingga *ready to work* setelah tamat kuliah nantinya.

(v) Penguatan Kelembagaan Inklusif

Tantangan kehidupan ke depan akan semakin menghadapi banyak ketidakpastian dan semakin kompleks. Selain dampak pandemi virus Covid-19 ini, tantangan besar lain yang saat ini kita hadapi bersama adalah kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar akibat resesi ekonomi dan efek pemanasan global. Dari bahasan sebelumnya, telah dibahas bahwa perilaku kelembagaan ekonomi dan politik yang bersifat ekstraktif yang hanya menguntungkan individu/grup sendiri justru dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak instabilitas secara nasional, dan pada akhirnya akan membawa kerugian bersama. Untuk itu, guna mengatasinya dibutuhkan semangat berkolaborasi dari semua pihak baik masyarakat, swasta dan pemerintah, dan bukan hanya di tingkat domestik, namun juga secara internasional. Dalam hal ini, pandangan lazim di masyarakat, persoalan sesulit apa pun, akan dapat diselesaikan jika dilakukan secara bersama-sama atau dengan berkolaborasi. Adapun interaksi yang bersifat kolaboratif memiliki

⁵⁴<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka>

beberapa komponen utama yaitu tujuan bersama, struktur yang simetris, dan tingkat negosiasi, interaksi, serta interdependensi yang tinggi dan diharapkan dapat menciptakan ide/inovasi sebagai motivasi/tujuan bersama untuk mencapai penghidupan/kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk menjadi bangsa yang maju, diperlukan kemampuan melakukan inovasi, mengelola sumberdaya secara efisien, serta melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Dalam kaitan ini, peran kepemimpinan ini sangatlah besar, dikarenakan bukan hanya menghindari keputusan berinovasi saja, namun juga ketidaksadaran atas kebutuhan pelebagaan atau institutionalisasi inovasi, yang merupakan penyebab utama. Jadi pemimpin diharapkan bukan hanya berani mengambil satu keputusan yang mungkin dipandang spekulatif untuk berinovasi, namun lebih dari itu melembagakan kemampuan dan proses inovasi (Juhro & Aulia, 2019). Jadi kepemimpinan, terutama di tingkat strategis adalah penentu utama apakah suatu organisasi akan berinovasi dan berinovasi secara terus-menerus dan berkelanjutan, atau tidak sama sekali. Hal ini dikarenakan tekanan evaluasi performa jangka pendek dan masa jabatan yang terbatas. Hal ini juga berlaku dalam kepemimpinan publik di pemerintahan yang evaluasinya dilakukan dalam jangka pendek dan masa jabatannya terbatas.

Untuk mencapai tujuannya secara optimal, seorang pemimpin yang efektif tentu perlu mempunyai beberapa pendekatan/strategi eksekusi di lapangan, terutama mengingat kita saat ini berada di era ketidakpastian yang tinggi. Salah satu pendekatan utama yang sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin di era ini adalah kolaborasi katalitis (*catalytic collaboration*). Menurut Juhro dkk. (2020c), *catalytic collaboration* merupakan pendekatan baru untuk membuat transformasi sosial/ekonomi yang dapat membantu berbagai organisasi untuk bekerja bersama-sama untuk tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar tujuan masing-masing organisasi tersebut. Dalam penerapannya, *catalytic collaboration* memiliki empat komponen utama, yaitu memprioritaskan pembelajaran, menerapkan cara berpikir dan bertindak yang sistematis, membuka akses sebesar-besarnya atas aset/informasi bersama, serta membangun hubungan jangka panjang yang beraneka ragam dan bersifat transformasional.

Catalytic collaboration menjadi relevan untuk diterapkan karena isu-isu yang muncul semakin hari semakin kompleks. *Catalytic collaboration* dapat menyatukan potensi-potensi pertumbuhan ekonomi yang terdapat di tiap daerah sehingga pertumbuhan ekonomi nasional semakin baik. Seiring dengan kompleksitas, tantangan, perubahan yang terjadi secara global, kebutuhan akan pemimpin yang dapat membantu sebuah organisasi untuk bertahan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi semakin tinggi. Pentingnya *catalytic collaboration* menunjukkan seorang pemimpin yang memiliki kompetensi dari *transformational leadership* tidaklah cukup, diperlukan juga adanya *catalytic collaboration* untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Dengan kompetensi dan kolaborasi dimaksud, pemimpin dapat menggerakkan organisasinya dengan solid untuk mencapai target secara efisien dan efektif.

Dalam kondisi wabah Covid-19 dan resesi ekonomi saat ini yang telah menimbulkan dampak kerugian kesehatan fisik-mental masyarakat dan tekanan sosial-ekonomi, namun dari sisi lain, juga dapat dipandang sebagai *opportunity* atau momentum yang tepat untuk menerapkan

catalytic collaboration terutama dalam merespons dampak pandemik yang luar biasa saat ini. Pemikiran dan tindakan yang sistematis dengan dasar pembelajaran terhadap kondisi aktual pada tiap fase pandemi ini akan menciptakan respons yang sesuai sasaran serta memperhatikan segala konsekuensinya secara komprehensif. Pembukaan akses informasi oleh pemerintah akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempelajari kondisi terkini melalui informasi yang terpercaya dari pemerintah. Sinergi antar lembaga pemerintahan yang transformasional juga dibutuhkan karena dampak dari Covid-19 yang bersifat multidimensi, sehingga dibutuhkan hubungan yang baik antar pemimpin suatu wilayah/lembaga sehingga respons yang dilakukan adalah hasil dari kolaborasi yang mempertimbangkan komponen keberlanjutan. Hal ini tentu saja akan dapat diaplikasikan apabila pemimpin dimaksud terkait memiliki kompetensi dari *transformational leadership* yang dapat meningkatkan kapabilitas pemerintah dalam melakukan adaptasi dan inovasi terhadap setiap masalah yang ditimbulkan oleh Covid-19.⁵⁵

Dapat ditegaskan bahwa dalam konteks inovasi, kepemimpinan di dalam suatu organisasi seharusnya juga tidak bergantung hanya pada sebagian individu yang inovatif, namun terdapat proses terstruktur dan terlembaga yang membuat orang-orang menjadi lebih inovatif sehingga terdapat proses pemikiran yang berkembang dari ideasi, lalu tumbuh jadi solusi, lalu berkembang menjadi inovasi, hingga kemudian menciptakan disrupsi yang membawa pembaruan. Terobosan yang membawa pembaruan adalah akibat, sedangkan pelembagaan inovasi dalam bentuk ekosistem inovasi adalah penyebabnya. Kepemimpinan transformatif tidak hanya berani mengambil risiko dan keluar dari tekanan evaluasi jangka pendek dan masa jabatan terbatas, namun juga memandang inovasi sebagai hal yang perlu dijaga keberlanjutannya dengan menstrukturisasi dan melembagakan proses inovasi. Bentuk komitmen dan keseriusan organisasi atas hal ini terlihat dengan adanya suatu posisi kepemimpinan senior di level strategis dalam bentuk *Chief Innovation Officer* (CIO) atau *Chief Networking Officer* (CNO), yang berbeda fungsinya dengan *Chief Information Officer* (CIO). Tentunya dengan adanya seorang CIO/CNO, maka akan ada departemen khusus dengan fokus inovasi, daripada menjadikan inovasi sebagai kegiatan sampingan atas tiap departemen. Pada akhirnya, hasil yang dapat terlihat adalah terobosan yang membawa pembaruan yang tidak hanya berdampak, namun juga berkelanjutan. Inovasi-inovasi kebijakan dengan mengandalkan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang terwadahi oleh institusi yang inovatif akan sangat membantu dalam percepatan penanganan kesehatan dan pemulihan kondisi negara dari dampak pandemi Covid-19 ini.

Selain kepemimpinan dalam organisasi formal, aspek kepemimpinan yang tangguh dan transformatif juga sangat dibutuhkan untuk memajukan masyarakat kita yang mayoritas masih

⁵⁵*Transformational leadership* merupakan kepemimpinan yang menginspirasi dan mendorong anggota organisasi, maupun anggota masyarakat, untuk menentukan sebuah tujuan yang besar dan mencapainya bersama-sama. Dalam fokusnya untuk memengaruhi orang lain, terdapat empat level hubungan antara pemimpin dan anggota dalam kepemimpinan transformasional, yaitu secara profesional, personal, emosional, dan intelektual. Keempat level hubungan/pengaruh pemimpin terhadap anggota ini akan menentukan efektivitas transformasi dalam diri anggota.

berpendidikan rendah, tinggal di pedesaan/pendalaman yang jauh dari akses informasi dan juga belum banyak terjangkau oleh infrastruktur modern khususnya digitalisasi. Untuk itu, peranan tokoh agama dan masyarakat di daerah tersebut sebagai *informal leaders* juga mempunyai peranan kritical untuk membawa daerahnya menjadi lebih maju dan bertransformasi di segala bidang.

Selain *feature* kelembagaan dengan *leadership*, sebuah negara dengan yang kuat juga seharusnya memiliki kemasyarakatan (*followership*) yang madani, ditopang oleh modal sosial dan tingkat pendidikan yang tinggi. Kondisi ini juga sangat dibutuhkan terutama dalam menghadapi krisis kesehatan saat ini, dimana komunitas seharusnya akan mudah untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari di era new normal. Dengan adanya *followership* yang kuat, rakyat yang memiliki *trust* dan secara solid/kompak dalam mengikuti pemimpinnya akan menciptakan masyarakat yang madani. Beberapa contoh negara yang telah mencapai tingkat kemadaniaan tinggi adalah Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Negara-negara tersebut telah memiliki modal sosial yang kuat dan tingkat pendidikan yang tinggi. Masyarakat yang madani memiliki pandangan yang rasional yang diimbangi dengan pendekatan emosional sehingga masyarakat ini bersifat inklusif dan toleran. Di Indonesia, di tengah musibah yang melanda saat ini, memiliki momentum untuk memanfaatkan *trust* dan semangat gotong royong sebagai komponen penting dari modal sosial. Transformasi Indonesia menuju masyarakat madani dengan *transformational leadership* yang didukung *followership* yang kuat akan dapat mengakselerasi Indonesia dalam beradaptasi di era kenormalan baru dan menjadi aset besar untuk melakukan lompatan besar menjadi negara maju, serta menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di masa depan.

Dalam konteks penguatan kelembagaan dalam skala yang lebih luas, sejalan dengan perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis maka Indonesia juga dituntut untuk mampu memanfaatkan arah perkembangan ini dengan segera memperbaiki iklim berusaha, mewujudkan kemudahan lalu-lintas barang dan jasa, meningkatkan daya saing infrastruktur dan suprastruktur ekonomi, dan terus merespons secara proaktif tren ekonomi dunia. Oleh karenanya, penguatan kolaborasi dalam artian revitalisasi kemitraan atau kerjasama dengan blok ekonomi regional dan global menjadi salah satu langkah yang sangat strategis dalam mendorong daya saing dan pemasaran produk-produk ekspor Indonesia. Terlebih mengingat kedekatan negara-negara anggota secara geografis dan hubungan kerja sama yang selama ini sudah dibangun dalam bilateral. Revitalisasi kemitraan tersebut juga akan mendorong peran Indonesia lebih jauh ke dalam rantai pasok global (*global supply chain*) dengan memanfaatkan *backward linkage*, yakni memenuhi kebutuhan bahan baku atau bahan penolong yang lebih kompetitif dari negara mitra lainnya; dan *forward linkage*, yakni dengan memasok bahan baku atau bahan penolong ke negara lainnya. Langkah ini akan mendorong pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya beberapa sektor prioritas sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

V. Strategi Implementasi

Mengacu pada lima strategi pokok dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif di era normal, selanjutnya dapat dirumuskan sejumlah strategi utama dalam implementasinya sebagai berikut. *Pertama*, penguatan strategi dengan mencari solusi “*dynamic optimization*” dengan *multiple constraints*. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa saat ini perekonomian dunia dan nasional menghadapi tantangan yang sangat besar dan kompleks. Pandemi covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia bukan hanya mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa, tetapi juga menghantam kinerja perekonomian global. Akibatnya, perekonomian dunia, termasuk Indonesia, menghadapi ancaman krisis dan menghadapi risiko peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks ini, krisis kesehatan dan krisis ekonomi membuat otoritas di setiap negara di dunia menghadapi masalah yang begitu kompleks (*multiple constraints*). Dalam sudut pandang “*dynamic optimization*”, pengambilan keputusan tentu membutuhkan penanganan yang terencana, terukur dan terpadu. Oleh karena itu, penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi harus berjalan beriringan, karena krisis kesehatan dan krisis ekonomi saling berkaitan. Penyelesaian krisis kesehatan akan membutuhkan kekuatan ekonomi; dan sebaliknya krisis ekonomi mensyaratkan penyelesaian krisis kesehatan dengan baik.

Kedua, strategi dan *timing* respons kebijakan untuk mengatasi kombinasi *supply-demand shocks* secara paralel. Fenomena pandemi Covid-19 juga menunjukkan tekanan sisi *supply* dan *demand* secara bersamaan; yang saling memberikan *feedback-loop* satu sama lain. Oleh karena itu, strategi dan *timing* respons kebijakan menjadi penting. Dari berbagai pengalaman di berbagai negara dan pengamatan fenomena yang terjadi di lapangan, diyakini agar otoritas perlu merespons tekanan sisi *demand* dalam jangka pendek. Spirit dasar dari berbagai langkah yang dilakukan tersebut adalah bahwa, dalam jangka pendek, bagaimana menumbuhkan permintaan masyarakat di tengah *supply disruption* dan *demand shock* yang terjadi. Sisi permintaan ditumbuhkan terlebih dulu dengan harapan akan diikuti oleh peningkatan sisi penawaran. Untuk itu, peran kebijakan fiskal menjadi sangat penting untuk men-*jumpstart* perekonomian melalui strategi penyerapan anggaran yang cepat dan tepat, sebagaimana pula program peningkatan pengeluaran untuk *public goods*, seperti bantuan sosial, yang dilakukan pada masa-masa awal dan kemudian diikuti oleh program-program yang lebih terintegratif, yaitu PEN. Dalam perspektif waktu selanjutnya, diharapkan dampak stimulus moneter dan keuangan akan bekerja untuk mengakselerasi kegiatan sektor riil lebih lanjut, tentunya dengan dukungan peran aktif dunia usaha dan masyarakat.

Ketiga, penguatan sinergi dan terobosan (*breakthrough*). Langkah penyelamatan perekonomian perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengawal penerapan tatanan kehidupan baru (*new normal*) untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali bergairah. Pemahaman konteks *new normal* akan mengarahkan persepsi kita mengenai kondisi yang tentunya berbeda dengan kondisi sebelumnya. Namun demikian, dalam *new normal* kita perlu merumuskan berbagai opsi strategi kebijakan yang tepat, sehingga sekaligus dapat menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Penerapan strategi dalam *era new normal* diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, dimana dengan mulai

beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat bergeliat kembali dan pada akhirnya mengontrol pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, melalui *new normal*, otoritas kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat – baik di pusat maupun daerah, perlu memperkuat sinergi untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat; serta di sisi lain, semua pihak juga diharapkan tetap berupaya menghentikan penyebaran pandemi Covid-19. Dalam hal ini, pengendalian krisis dan pemulihan ekonomi nasional perlu mengedepankan kepemimpinan (yang kuat) serta menggunakan cara-cara pemulihan yang lebih inovatif guna menciptakan terobosan-terobosan (*breakthrough*). Pendekatan pemulihan yang bersifat sektoral yang lebih fokus pada daerahnya masing-masing perlu disempurnakan. Krisis yang multidimensi yang melanda semua daerah di Indonesia perlu penanganan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi dengan optimal.

Keempat, membangun strategi untuk memperkuat ketahanan sistemik (*systemic resilience strategies*). Belajar dari pengalaman pandemi Covid-19, saat ini kita hidup dalam kondisi ketidakpastian dalam suatu sistem yang dinamis, saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain di masa depan, sehingga faktor *shock* meskipun awalnya berskala kecil, namun dapat menimbulkan dampak yang teramplifikasi menjadi sangat bagi seluruh sistem di suatu negara atau dunia. Untuk itu, kita membutuhkan suatu wawasan dan metode dari berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk membuat gambaran realistis tentang bagaimana suatu sistem terbentuk, dan juga berguna untuk membangun “sebuah sistem dari berbagai sistem” (*system of systems*) yang lebih besar secara integratif. Secara implementatif, kondisi ini juga menekankan kita akan pentingnya resiliensi suatu sistem terhadap berbagai guncangan/tekanan, yang memungkinkan sistem untuk pulih khususnya dari fungsi yang hilang (*lost functionality*) dan beradaptasi dengan realitas baru terkait ekonomi internasional, kebutuhan masyarakat, dan perilaku manusia serta risiko iklim yang lebih tidak terduga (OECD, 2020).

Systemic resilience strategies menekankan pentingnya bukan hanya pencegahan, tetapi juga pemulihan dan adaptasi setelah terjadinya *shocks*. Aspek resiliensi ini perlu “mengakui” bahwa kemungkinan gangguan secara masif dapat terjadi kembali di masa depan sehingga menjadi penting bagi sistem ini untuk memiliki kapasitas untuk pemulihan dan adaptasi untuk memastikan keberlanjutan hidup di masa depan, termasuk juga memanfaatkan peluang-peluang baru terungkap pada saat krisis untuk melakukan perbaikan ancaman sistemik yang lebih luas/lebih besar. Contohnya, pandemi Covid-19 memberikan kesempatan untuk mengatasi keadaan darurat lain seperti perubahan iklim dengan lebih efektif. Dengan kata lain, momentum ini dimanfaatkan untuk memantul ke depan (“bouncing forward”), bukan malah sebaliknya memantul ke belakang atau “bouncing backward” (Linkov dkk., 2018). Dengan demikian, *systemic resilience strategies* ini perlu dikembangkan, tidak hanya untuk menghadapi pandemi Covid-19 saat ini saja, namun terpenting adalah kemungkinan adanya pandemi (guncangan lain) di masa depan. Untuk itu, dibutuhkan *sharing* informasi (data) yang terkait antar negara seperti *sharing* mengenai tipe pencegahan dan penanganan yang efektif dalam mengatasi pandemi, informasi mengenai vaksin dan obat pencegah lainnya, cara-cara pencegahan penyebaran penyakit, dan kesadaran dasar sanitasi.

Kelima adalah penguatan strategi komunikasi. Komunikasi secara efektif oleh para pemimpin sangat penting untuk mengelola kredibilitas suatu kebijakan, tidak hanya sekedar untuk meningkatkan transparansi. Di masa krisis komunikasi dari para pemimpin seringkali tidak efektif, atau bahkan salah. Sering para pemimpin bersikap terlalu percaya diri dan optimis pada tahap awal krisis dan juga cenderung menunda pengumuman untuk waktu yang lama sementara mereka menunggu lebih banyak fakta muncul dan keputusan dibuat. Walau tidak terdapat pendekatan baku mengenai bagaimana strategi komunikasi sebaiknya dilaksanakan, diperlukan komunikasi yang bijaksana dan sering untuk menunjukkan bahwa para pemimpin mengikuti situasi dan menyesuaikan respons mereka saat mereka belajar lebih banyak. Ini membantu mereka meyakinkan pemangku kepentingan bahwa mereka sedang menghadapi krisis. Para pemimpin harus sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa masalah, pertanyaan, dan minat masyarakat luas ditangani. Komunikasi tidak boleh berhenti setelah krisis berlalu. Menawarkan pandangan yang optimis dan realistis dapat memberikan pengaruh yang kuat pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, menginspirasi mereka untuk mendukung pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

Daftar Referensi

- Acemoglu, D., dan Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty*. New York: Crown Publishers.
- Azevedo, J.P., Hasan, A., Goldemberg, D., Iqbal, S.A., dan Geven, K., (2020). Simulating the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes, World Bank, Jakarta.
- Deming D.J. (2017). The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market. *Quarterly Journal of Economics*. 132 (4) :1593-1640.
- Dwijendra, N.K.A. dan Mahardika, M. (2018). The Influence of Globalization on The Existence of Local Culture In Indonesia. *Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary*. 5.
- Epstein, J.M., Parker, J., Cummings, D., dan Hammond, R.A. (2008). Coupled Contagion Dynamics of Fear and Disease: Mathematical and Computational Explorations. *PLoS ONE*, 3(12): e3955.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. New York: Free Press.
- Juhro, S.M., Narayan, P.K., Iyke, B.N, & Trisnanto, B. (2020a). Is There a Role for Islamic Finance and R&D in Endogenous Growth Models in the Case of Indonesia? *Pacific Basin Finance Journal*, Elsevier.
- Juhro, S.M., Narayan, P.K., Iyke, B.N, & Trisnanto, B. (2020b), Social Capital and Provincial Growth in Indonesia, *Regional Studies*. Forthcoming.

- Juhro S.M. (2013). Penguatan Peran Bank Indonesia dan Optimalisasi Strategi Bauran Kebijakan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Makalah SESPIBI, Bank Indonesia, Jakarta.
- Juhro, S.M. (2019). *Transformational Leadership: Konsep, Pendekatan, dan Peran dalam Pembangunan*. Bank Indonesia Institute, February.
- Juhro, S.M. dan Aulia, A.F. (2019). New Sources of Growth: The Role of Frugal Innovation and Transformational Leadership. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*. Vol. 22, No. 3 (2019), pp. 383 – 402
- Juhro, S.M., Aulia, A.F., Hadiwaluyo, D., Aliandrina, D., dan Lavika, E. (2020c). The Role of Catalytic Collaboration in Leveraging Transformational Leadership Competencies to Generate Sustainable Innovation. *International Journal of Organizational Leadership*. 9(2020) 48-66
- Lawrence, S., Hogan, M., Brower, A., dan Zayed, S. (2020). Global Practices for Building Innovation Ecosystems. <https://www.ksi-indonesia.org/en/knowledge/detail/1827-global-practices-for-building-innovation-ecosystems>.
- Linkov, I., Trump, B.D., & Keisler, J. (2018). Risk and resilience must be independently managed. *Nature*. 555(7694), 30–30.
- Mankiw, N.G. (2003). *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). A systemic resilience approach to dealing with Covid-19 and future shocks. <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/>
- Putnam, R.D. (1993). What makes democracy work?. *National Civic Review*. Vol.82(2) 101-107.
- Ridhwan, M.M., dan Pratama, R. (2016). Analisis Pertumbuhan dan Daya Saing Manufaktur Nasional serta Implikasinya terhadap Jebakan Kelas Menengah. Background Paper RDG, Bank Indonesia.
- Romer, P.M. (1987). Growth Based on Increasing Returns Due to Specialization. *American Economic Review*. American Economic Association, vol. 77(2) 56-62, May.
- Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*. University of Chicago Press, vol. 98(5) 71-102, October.
- Schumpeter, J.A. (1911). *The Theory of Economic Development*. Cambridge: Harvard University Press.
- Solow, R.M., (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, Oxford University Press, vol. 70(1), pages 65-94.
- Suparmi, Kusumawardani, N., Nambiar, D., Trihono dan Hosseinpoor, A.R. (2018). Subnational Regional Inequality in the Public Health Development Index in Indonesia. *Global Health Action* 11 (sup1): 1500133.
- Todaro, P.M. dan Smith, S.C. (2006). *Economic Development*. Boston: Pearson Addison Wesley.
- U.S. Geological Survey. (2014). *Mineral commodity summaries 2014*. U.S. Geological Survey.
- World Bank (2014). *Indonesia Development Policy Review 2014*. Jakarta: World Bank Office Jakarta